

**PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH,
PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH DAN
KOMPETENSI SUMBERDAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SERDANG BEDAGAI**

SKRIPSI

Oleh:

RIZKY AULINA NUR

NIM 52154097

Program Studi
AKUNTANSI SYARIAH



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2019

**PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH,
PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH DAN
KOMPETENSI SUMBERDAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SERDANG BEDAGAI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:

RIZKY AULINA NUR

NIM 52154097

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN

2019

ABSTRAK

Rizky Aulina Nur (2019), Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Dengan Pembimbing Skripsi I M.Irwan Padli Nasution, M.M, M.Kom dan Pembimbing II Rahmat Daim Harahap, M.Ak.

Opini audit dapat bermanfaat untuk keberlangsungan instansi pemerintah. Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pada tahun 2015 Kabupaten Serdang Bedagai memperoleh opini WDP dan tidak ada perkembangan ditahun berikutnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sedang Bedagai. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Penelitian Kuantitatif, jenis data primer dengan teknik kuesioner. Responden penelitian ini adalah Kasubag keuangan dan Bendahara di 28 SKPD Kabupaten Serdang Bedagai. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *Purposive sampling*, sehingga diperoleh 56 orang sebagai sampel. Data dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil uji parsial (t) untuk variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,074 > 2,00665$). Jadi disimpulkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Variabel pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah diketahui $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,789 > 2,00665$). Dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Variabel kompetensi sumberdaya manusia diketahui $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,379 > 2,00665$). Dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumberdaya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan uji simultan (F) diketahui bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($31,029 > 2,78$). Dapat disimpulkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dan kompetensi sumberdaya manusia secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci : SAP, SIKD, Kompetensi Sumberdaya Manusia, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah *Subhanahu Wata'aala*, atas segala limpahan nikmat kesehatan, kesabaran, kekuatan serta ilmu pengetahuan kepada hamba-Nya. Atas perkenaan-Nya pula sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, bukti perjuangan yang panjang dan jawaban atas do'a yang senantiasa mengalir dari orang-orang terkasih. Sholawat serta salam "Allahumma Sholli Ala Sayyidina Muhammad" juga peneliti sampaikan atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Sang pejuang sejati yang telah membawa kebenaran.

Skripsi ini berjudul **"PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH DAN KOMPETENSI SUMBERDAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI"** diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa isi yang terkandung didalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan skripsi ini baik dengan dosen pembimbing maupun dari pihak yang berpengalaman. Penulis berharap apa yang dibuat dapat bermanfaat bagi yang membutuhkannya dan dapat menambah pengetahuan serta informasi bagi pembacanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan secara materil maupun nonmateril dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Teristimewa kepada kedua Orangtua penulis, yaitu Bapak Nurdin dan Ibu Supriana. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas pengorbanan dalam mendidik dan membesarkan, memberikan doa, cinta, kasih sayang, nasihat dan semangat serta dukungan yang tak bisa ternilai harganya demi kelancaran dan keberhasilan penulis dalam berbagai hal terkhusus untuk penyelesaian skripsi ini. Dan tak lupa pula untuk Adik tersayang Dwi Abdillah Nur yang selalu menghibur dan memberikan semangat kepada penulis.
2. Ibu Hj. Bonirah dan Bapak Suwito yang telah banyak membantu dan menjaga penulis dengan baik selama menempuh pendidikan di Medan. Beserta seluruh keluarga besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah bersedia mendoakan dan membantu penulis.
3. Terspesial Paidi yang selalu memberikan motivasi, nasihat, bantuan dan waktu luangnya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Prof. Dr. H. Saidurrahman, MA selaku rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
5. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
6. Bapak Hendra Hermain, SE., M.Pd selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah dan Ibu Kusmilawaty, Ak, M.Ak selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah
7. Bapak M. Irwan Padli Nasution, M.M. M.Kom selaku Pembimbing Skripsi I dan Bapak Rahmat Daim Harahap, M.Ak selaku Pembimbing Skripsi II ditengah-tengah kesibukannya telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan selalu mampu memberikan motivasi bagi penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Bapak Dr. Ridwan, M.Ag selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis dan memberikan nasihat

9. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu yang luar biasa serta membantu penulis dalam kegiatan perkuliahan.
10. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dan seluruh pegawai SKPD yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
11. Sahabat tersayang Khairani, Asih, Vini, Isti, Sindi, Julia yang selalu bersama dan mendoakan penulis dalam penyelesaian skripsi ini
12. ISIM Squad yang selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dan menjadi teman terbaik selama masa perkuliahan
13. Teman-teman seperjuangan Akuntansi Syariah C 2015 yang telah berjuang bersama-sama peneliti selama masa perkuliahan
14. Keluarga KKN 09 dan masyarakat Kelurahan Satria Binjai Kota
15. Dan semua pihak-pihak yang tidak dapat penulis tuliskan namanya satu-persatu yang telah berkenan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengharapkan skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak terutama mahasiswa lain agar dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan dapat digunakan sebagai sumber referensi dalam pembuatan skripsi selanjutnya. Semoga Allah melimpahkan Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Oktober 2019
Penulis

Rizky Aulina Nur
NIM . 52154097

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | viii |
| DAFTAR GAMBAR | ix |
| DAFTAR LAMPIRAN | x |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 7 |
| C. Batasan Masalah | 8 |
| D. Rumusan Masalah | 8 |
| E. Tujuan dan Manfaat penelitian..... | 9 |
| BAB II KAJIAN TEORITIS | |
| A. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah..... | 11 |
| 1. Pengertian Laporan Keuangan | 11 |
| 2. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan..... | 12 |
| 3. Tujuan Laporan Keuangan..... | 12 |
| 4. Komponen Laporan Keuangan..... | 13 |
| 5. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah | 15 |
| 6. Faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan..... | 17 |
| 7. Landasan Syar'i Laporan Keuangan..... | 19 |
| B. Standar Akuntansi Pemerintahan | 21 |
| 1. Pengertian Akuntansi..... | 21 |

| | |
|--|----|
| 2. Pengertian Akuntansi Pemerintahan..... | 22 |
| 3. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)..... | 23 |
| 4. Kerangka Konseptual SAP..... | 23 |
| 5. Pemahaman Standar Akuntansi pemerintahan..... | 25 |
| C. Sistem Informasi Keuangan Daerah..... | 28 |
| D. Kompetensi Sumberdaya Manusia..... | 30 |
| E. Penelitian Terdahulu | 32 |
| F. Kerangka Teoritis..... | 36 |
| G. Hipotesis | 38 |

BAB III_Toc24357568 METODE PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Pendekatan Penelitian..... | 40 |
| B. Tempat dan Waktu Penelitian..... | 40 |
| C. Populasi dan Sampel Penelitian | 41 |
| D. Jenis Data Penelitian | 44 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 44 |
| F. Definisi Operasional..... | 45 |
| G. Teknik Analisis Data..... | 49 |
| 1. Statistik Deskriptif..... | 49 |
| 2. Uji Kualitas Data | 50 |
| 3. Uji Asumsi Klasik | 51 |
| 4. Uji regresi linear berganda | 52 |
| 5. Uji Hipotesis..... | 52 |

BAB IV_HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai | 54 |
| B. Deskripsi Data Penelitian | 57 |

| | |
|---|-----------|
| C. Hasil Analisis Statistik Deskriptif..... | 60 |
| D. Uji Kualitas Data..... | 61 |
| 1. Uji Validitas | 61 |
| 2. Uji Reliabilitas..... | 63 |
| E. Uji Asumsi Klasik..... | 64 |
| 1. Uji Normalitas | 64 |
| 2. Uji Multikolinearitas..... | 67 |
| 3. Uji Heteroskedastisitas | 68 |
| F. Uji Analisis Regresi Berganda..... | 69 |
| G. Uji Hipotesis..... | 70 |
| 1. Koefisien Determinan (Adjusted R ²)..... | 70 |
| 2. Uji t (Uji Parsial) | 71 |
| 3. Uji F (Uji Simultan)..... | 73 |
| H. Pembahasan | 74 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 80 |
| B. Saran..... | 81 |
| DAFTAR PUSTAKA | 82 |

DAFTAR TABEL

| Tabel | Hal |
|--|-----|
| 1. Tabel 1.1 Perkembangan Opini Kab Sergai..... | 4 |
| 2. Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian terdahulu..... | 32 |
| 3. Tabel 3.1 Rincian waktu penelitian..... | 41 |
| 4. Tabel 3.2 Populasi..... | 42 |
| 5. Tabel 3.3 Skala Pengukuran Likert..... | 45 |
| 6. Tabel 3.4 Indikator Variabel | 45 |
| 7. Tabel 4.1 Data Responden berdasarkan Jenis Kelamin..... | 58 |
| 8. Tabel 4.2 Data Responden berdasarkan Usia | 58 |
| 9. Tabel 4.3 Data Responden berdasarkan Pendidikan terakhir..... | 59 |
| 10. Tabel 4.4 Data responden berdasarkan Latar Beelakang pendidikan. | 59 |
| 11. Tabel 4.5 Data responden berdasarkan lama bekerja..... | 60 |
| 12. Tabel 4.6 Statistik Deskriptif | 61 |
| 13. Tabel 4.7 Hasil uji validitas variabel X_1 | 62 |
| 14. Tabel 4.8 Hasil uji validitas variabel X_2 | 62 |
| 15. Tabel 4.9 Hasil uji validitas variabel X_3 | 62 |
| 16. Tabel 4.10 Hasil uji validitas variabel Y..... | 63 |
| 17. Tabel 4.11 Hasil uji Reliabilitas..... | 64 |
| 18. Tabel 4.12 Hasil uji Normalitas | 66 |
| 19. Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolinearitas..... | 67 |
| 20. Tabel 4.14 Hasl Regresi Berganda..... | 69 |
| 21. Tabel 4.15 Hasil Uji R^2 | 71 |
| 22. Tabel 4.16 Hasil Uji t | 72 |
| 23. Tabel 4.17 Hasil Uji F | 74 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Hal |
|---|-----|
| 1. Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran..... | 37 |
| 2. Gambar 4.1 Uji Normalitas dengan Histogram..... | 65 |
| 3. Gambar 4.2 Uji Normalitas dengan Normal P-P Plot..... | 66 |
| 4. Gambar 4.3 Uji Heteroskedastisitas dengan Scater Plot..... | 68 |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Data Quesioner
- Lampiran 2 : Data Uji Instrumen
- Lampiran 3 : Output SPSS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam undang undang no. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Banyak pihak yang mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah sebagai bahan pengambilan keputusan. Informasi yang disajikan harus bermanfaat bagi para pemakai dan informasi tersebut harus mempunyai nilai. Sehingga pemerintah perlu memperhatikan kualitas laporan keuangan tersebut. ¹

Kualitas laporan keuangan pemerintah merupakan permasalahan yang sangat penting untuk dibahas terkait dengan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatan organisasi kepada publik. Kualitas merupakan sesuatu yang sudah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria untuk menilai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Peraturan tersebut menjelaskan terdapat 4 prasyarat normatif agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas, yaitu relevan, andal, dapat diperbandingkan dan dapat dipahami.

Faktor faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan antara lain : Kompetensi sumber daya manusia, Teknologi informasi, peran PPK-SKPD, Rekonsiliasi, dan Sistem Pengendalian Intern. Kualitas laporan keuangan

¹ Rashwan Zuhudy Rafid, “Pengaruh pemahaman SAP dan Pemanfaatan SIA terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2016), h. 1

berpengaruh pada akuntabilitas, dengan kualitas laporan keuangan yang baik akan memberikan pertanggung jawaban atas laporan keuangan yang dibuat, hal tersebut akan berpengaruh terhadap pemberian opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan.²

Banyaknya kasus-kasus mengenai buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih menjadi isu hangat yang perlu dikaji lebih dalam. Permasalahan ini dibuktikan dengan masih sedikitnya instansi pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP bahkan di beberapa instansi pemerintah daerah yang ada di Indonesia masih memperoleh opini disclaimer. Opini disclaimer diberikan terhadap laporan keuangan karena Badan Pengawas Keuangan (BPK) mengalami kesulitan dalam menerapkan prosedur audit pada beberapa pos yang disajikan. Rendahnya kualitas laporan keuangan, secara umum disebabkan penyusunan laporan keuangan yang belum memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun 2015, seluruh Pemda telah menerapkan akuntansi berbasis akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berdasarkan peraturan tersebut, laporan keuangan pemda yang semula terdiri atas Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), bertambah 3 laporan yaitu Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Faktor terkait kualitas proses penyusunan laporan keuangan adalah kepatuhan dan pemahaman terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Adanya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memahami mekanisme penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan menjadi kendala dalam mewujudkan LKPD yang berkualitas. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik pemerintah daerah harus menyampaikan laporan pertanggung jawaban pemerintah yang baik

² Meta Dewi Rianisanti, *Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderating*, (Skripsi: Fakultas Eonmi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, 2017). Hal. 1

dan benar dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku umum.³

Hal lain yang mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah pemanfaatan Teknologi Informasi (TI). Pemanfaatan teknologi Informasi merupakan salah satu faktor untuk mewujudkan laporan keuangan yang memiliki ketepatan waktu dalam penyajiannya serta informasi didalamnya dapat diandalkan. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 tahun 2010 yang menjelaskan terkait sistem informasi keuangan daerah. Peraturan tersebut mengatur batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan daerah serta terkait dana perimbangan yang tertunda apabila terlambat dalam melakukan penyampaian.

Dengan kemajuan teknologi informasi yang berkembang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Teknologi Informasi juga dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan secara cepat dan akurat.⁴ Sistem informasi tersebut dikenal dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah sangat penting dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan memanfaatkan program informasi teknologi untuk mendukung

³ Eriadi. *Analisis Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Sumatera Utara Dengan Efektivitas Reviu APIP Sebagai Pemoderasi*. (Disertasi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU, 2018). Hal. 1-3

⁴ Muhammad Hanif Purba “*Pengaruh penerapan SAP berbasis akrual, kebijakan akuntansi, pemanfaatan teknologi informas, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah kabupaten deli serdang*” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU, 2017), h. 5

sistem informasi keuangan daerah. Seiring diberlakukannya penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, dapat dipastikan bahwa penerapannya memerlukan sarana pendukung berupa teknologi informasi yang berbasis sistem. Teknologi informasi meliputi computer (*mainframe, mini, micro*), Perangkat Lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi.⁵

Laporan keuangan yang baik juga tidak dapat dipisahkan dari faktor kompetensi sumberdaya manusia. Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam suatu organisasi untuk melaksanakan fungsi fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas 533 LKPD tahun 2015, BPK memberikan opini WTP atas 312 (58%) LKPD, opini WDP atas 187 (35%) LKPD, opini TMP atas 30 (6%) LKPD, dan opini TW atas 4 (1%) LKPD. Terdapat penurunan opini atas 30 LKPD Tahun 2015 dan salah satunya yaitu Kabupaten Serdang Bedagai.

Tabel 1.1 Perkembangan opini Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2013-2017

| Entitas Pemerintah Daerah | Opini | | | | |
|------------------------------|-------|---------|------|------|------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Kabupaten Serdang Bedagai | WDP | WTP DPP | WDP | WDP | WDP |

Sumber : BPK RI (2018)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2014 mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP DPP). Terkait dengan Penyimpangan SAP yang tidak material atas penyajian akun-akun dalam laporan

⁵ Rianisanti, *Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderating*, h. 5

keuangan dan adanya penerapan akuntansi berbasis akrual untuk yang pertama kalinya. Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2015 hingga tahun 2017 mengalami penurunan opini. BPK memberikan opini terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Serdang bedagai yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Padahal Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai mengharapkan opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP). Penurunan opini terjadi karena adanya kelemahan dan ketidaksesuaian penyajian laporan keuangan dengan SAP terutama pada akun akun yang disajikan seperti pada akun Aset dan Beban. Penurunan opini ini menunjukkan kurangnya pemahaman Sumber daya manusia terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Menurut Bapak Asrul, SE selaku Kabid, penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sudah menerapkan PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah tentang penyajian laporan keuangan berbasis akrual. Yang terjadi pada pemerintah Kabupaten Sedang Bedagai yaitu adanya perubahan terhadap peraturan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis kas menuju berbasis akrual, masih diterapkan secara perlahan, masih kurangnya sumber daya manusia yang memahami akrual dan belum intensif pelaksanaannya sosialisasi dan pelatihan peraturan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Rendahnya tingkat pemahaman standar akuntansi pemerintah ini akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai semakin rendah.⁶

Kemudian berdasarkan survey yang dilakukan terhadap SKPD Kabupaten Serdang Bedagai ternyata pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah sudah cukup baik dioperasikan dan sudah terpenuhinya fasilitas pendukung teknologi informasi. Sudah cukupnya fasilitas computer, jaringan internet, serta pemeliharaan dan perbaikan computer untuk proses akuntansi sampai pembuatan laporan keuangan menggunakan SIMDA. Namun masih perlu diperbaiki dan dibenahi dalam hal koneksi yang terintegritasi dengan SIMDA keuangan daerah dan SIMDA BMD sehingga nanti menghasilkan sistem informasi keuangan yang

⁶ Dewi Aulia Fatma, *Analisis Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah(studi kasus pada SKPD kabupaten serdang bedagai, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU, 2017)*. hal. 64

berkualitas dan terintegritasi. SIMDA BMD belum maksimal dilakukan karena salah satu permasalahan opini BPK adalah belum terkelola dengan baik pengelolaan asset dan tidak sesuai dengan fisik dilapangan.

Kompetensi Sumber Daya Manusia yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, minimnya alokasi pegawai pada unit pengelola keuangan khususnya penyusun laporan keuangan dan masih kurangnya pemahaman dasar pegawai tentang administrasi keuangan daerah. Alokasi penempatan pegawai yang berlatar belakang akuntansi tidak merata dan belum sesuai dengan tugas dan fungsi pada tiap-tiap SKPD pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

Hasil informasi yang diperoleh, tahun-tahun sebelumnya pegawai yang berlatar belakang akuntansi banyak diterima, namun alokasinya ditempatkan di kantor camat. Sumber daya manusia yang berlatar belakang non akuntansi, akan tetapi dianggap mampu melaksanakan penyusunan laporan dengan modal diklat dan bimbingan. Belum maksimalnya penyusunan laporan keuangan disebabkan oleh kurangnya pemahaman pegawai keuangan tentang pengelolaan keuangan khususnya penyusunan laporan keuangan.⁷

Hal ini dibuktikan dari 47 orang bendahara pengeluaran SKPD di Kabupaten Serdang Bedagai hanya 5 orang (10,64%) yang memiliki latar belakang pendidikan S-1 jurusan Akuntansi sisanya sebanyak 42 orang memiliki latar belakang jurusan non akuntansi. Padahal untuk menjadi Bendahara pengeluaran harus memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai yaitu S-1 jurusan Akuntansi.⁸

Penelitian ini memodifikasi model penelitian Novi Anggraini (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Novi Anggraini (2017) adalah penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu kompetensi sumberdaya

⁷ *Ibid*, hal. 66

⁸ Rixtrynita juniarty. *pengaruh kualitas sumberdaya manusia, implementasi sistem informasi manajemen daerah, kejelasan peran dan motivasi terhadap kinerja bendahara pengeluaran SKPD serdang bedagai*. (tesis, Fakultas ekonomi dan bisnis USU, 2018). H. 6

manusia. Karena kompetensi sumberdaya manusia merupakan faktor yang sangat mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah

1. Terjadinya penurunan opini pada tahun 2015 karena adanya kelemahan dan ketidaksesuaian penyajian laporan keuangan dengan SAP terutama pada akun akun yang disajikan seperti pada akun Aset dan Beban
2. Perubahan terhadap peraturan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis kas menuju berbasis akrual, masih diterapkan secara perlahan, masih kurangnya sumber daya manusia yang memahami akrual dan belum intensif pelaksanaannya sosialisasi dan pelatihan peraturan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual
3. SIMDA BMD belum maksimal dilakukan karena salah satu permasalahan opini BPK adalah belum terkelola dengan baik pengelolaan asset dan tidak sesuai dengan fisik dilapangan.
4. Minimnya alokasi pegawai pada unit pengelola keuangan khususnya penyusun laporan keuangan dan masih kurangnya pemahaman dasar pegawai tentang administrasi keuangan daerah . Alokasi penempatan pegawai yang berlatarbelakang akuntansi tidak merata dan belum sesuai dengan tugas dan fungsi tiap-tiap SKPD pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

C. Batasan Masalah

Tujuan pembatasan masalah ini adalah agar ruang lingkup peneliti tidak luas dan lebih focus untuk menghindari kesalahan sehingga tidak menyimpang dari pokok permasalahan serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melihat identifikasi masalah diatas dan disesuaikan dengan beberapa faktor antara lain factor biaya, keterbatasan waktu penelitian dan kemampuan peneliti, maka peneliti membatasi penelitian ini pada pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan system informasi keuangan daerah dan kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten Serdang Bedagai.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian batasan masalah di atas, maka permasalahan yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai?
2. Apakah Pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai?
3. Apakah Kompetensi Sumberdaya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai?
4. Apakah pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumberdaya Manusia berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah kabupaten Serdang Bedagai?

E. Tujuan dan Manfaat penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari hasil penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
2. Untuk mengetahui pengaruh Pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
3. Untuk mengetahui kompetensi sumberdaya manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
4. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dan Kompetensi sumberdaya manusia terhadap laporan keuangan pemerintah kabupaten Serdang Bedagai secara simultan

b. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Bagi Peneliti

Diharapkan melalui penelitian ini agar dapat menambah dan memperdalam wawasan pengetahuan tentang pengaruh Pemahaman SAP, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dan kompetensi sumberdaya manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait di

Pemerintah Daerah dan dapat menjadi bahan masukan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

3. Bagi Akademisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan di bidang ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan dalam lingkungan sektor publik berperan penting dalam menciptakan akuntabilitas sektor publik. Semakin besarnya tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas sektor publik memperbesar kebutuhan akan transparansi informasi keuangan sektor public. Informasi keuangan ini berfungsi sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Akuntansi sektor public berperan penting dalam menyiapkan laporan keuangan sebagai perwujudan akuntabilitas publik. Mardiasmo menyebutkan fungsi laporan keuangan sektor publik yaitu : kepatuhan dan pengelolaan, akuntabilitas dan kepatuhan retrospektif, perencanaan dan informasi otorisasi, kelangsungan organisasi, hubungan masyarakat, sumber fakta dan gambaran.⁹

Ikatan Akuntan Indonesia mengemukakan pengertian laporan keuangan adalah struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Tujuan umum dari laporan keuangan ini untuk kepentingan umum adalah penyajian informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas dari entitas yang berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi para penggunanya. Untuk dapat mencapai tujuan ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai elemen dari entitas yang terdiri dari asset, kewajiban, networth, beban, dan pendapatan (termasuk *gain* dan *loss*), perubahan ekuitas dan arus kas. Informasi tersebut diikuti dengan catatan, akan membantu pengguna memprediksi arus kas masa depan.

Laporan keuangan adalah produk akhir dari akuntansi yang telah dilakukan. Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan dihasilkan dari masing masing Satuan Kerja

⁹ Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, *Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta : Salemba Empat, Ed. 2, 2010), hal. 125 -126

Perangkat Daerah (SKPD) yang kemudian dijadikan dasar dalam membuat laporan keuangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota.¹⁰

2. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain :

- a. Undang undang dasar Negara RI tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara
- b. Undang undang dibidang keuangan Negara
- c. Undang undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- d. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemerintah Daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah.
- e. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah
- f. Peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara/daerah
- g. Peraturan perundang undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.¹¹

3. Tujuan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Dengan :

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.

¹⁰ Erlina et al, *Akuntansi keuangan daerah berbasis akrual*, (Jakarta : Salemba Empat, cet. 2, 2015), hal 23-99

¹¹ *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Standar Akuntansi Pemerintah*, (Jakarta : Salemba Empat, 2012), h. 8-9

- b. Menyediakan informasi mengenai kecakupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil yang telah dicapai
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/ defisit-Laporan operasional, asset, kewajiban, ekuitas dan arus kas suatu entitas pelaporan.¹²

4. Komponen Laporan Keuangan

Pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh masing-masing SKPD. Laporan keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh entitas pelaporan dalam hal ini disebut sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten. Sesuai PSAP No. 1 Paragraf 14, komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan keuangan, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

¹² Abdul hafiz tanjung, *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 12

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Walaupun Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akruwal telah menetapkan basis pencatatan yang digunakan adalah akruwal, namun dalam penyusunan laporan Realisasi Anggaran tetap disajikan dengan menggunakan basis kas (PSAP BA 02 Paragraf 03 dan 04). Struktur Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi a) Pendapatan-LRA, b) Belanja, c) Transfer, d) surplus/defisit-LRA, e) Pembiayaan dan f) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)

Dalam PSAP BA 01 paragraf 41 dielaskan bahwa laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut : a) saldo anggaran lebih awal, b) penggunaan saldo anggaran lebih, c) sisa lebih kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, d) koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, e) lain-lain, f) saldo anggaran lebih akhir.

c. Neraca

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

d. Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional merupakan salah satu laporan yang harus disusun oleh pemerintah daerah setelah dikeluarkan Peraturan Pemerintah no 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akruwal. Manfaatnya yaitu tersedianya informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan, dan penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. PSAP BA 12 paragraf 13 menjelaskan bahwa struktur laporan operasional mencakup : a) Pendapatan-LO, b) Beban, c) Surplus/Defisit dari operasi, d) Kegiatan non operasional, e) Surplus/defisit sebelum pos luar biasa, f) pos luar biasa, g) Surplus/defisit-LO

e. Laporan Arus Kas (LAK)

PSAP BA 03 paragraf 15 mendefinisikan laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

PSAP BA 01 paragraf 101 menjelaskan lebih lanjut bahwa laporan perubahan ekuitas menyajikan pos-pos : a) ekuitas awal, b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, c) koreksi koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, d) Ekuitas Akhir.

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

PSAP BA 01 paragraf 83 menjelaskan bahwa catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi anggaran, Laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Selain itu, catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan.¹³

5. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki :

a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan

¹³ *Ibid*, h. 48-66

membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan :

- 1) Memiliki manfaat umpan balik (feedback value)
- 2) Memiliki manfaat prediktif (predictive value)
- 3) Tepat waktu
- 4) Lengkap

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik :

- 1) Penyajian jujur
- 2) Dapat diverifikasi (verifiability)
- 3) Netralitas

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menertapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ketahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.¹⁴

6. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Berdasarkan alur dan unsur yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan ada lima faktor utama yang menentukan kualitas laporan keuangan SKPD, yaitu sebagai berikut:

a. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai. Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut.

b. Teknologi Informasi

Teknologi merupakan alat yang digunakan individu dalam penyelesaian tugas mereka. Dalam konteks sistem informasi, teknologi terkait dengan sistem komputer (perangkat keras, perangkat lunak dan data) dan penggunaan jasa pendukung yang memberikan panduan pengguna dalam penyelesaian tugas. Model terfokus pada pengaruh sistem secara spesifik atau pengaruh umum seperangkat sistem, kebijakan dan jasa yang diberikan oleh departemen sistem informasi.

¹⁴ *Ibid*, h. 13-15

c. Peran PPK-SKPD

Dalam peraturan menteri dalam negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD. PPK-SKPD sebagaimana dimaksud mempunyai tugas antara lain: menyiapkan laporan keuangan SKPD, dan melaksanakan verifikasi atas SPJ yang disampaikan oleh bendahara penerimaan/pengeluaran.

d. Rekonsiliasi

Sesuai Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER-/PB/2009 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara, rekonsiliasi merupakan salah satu kunci dalam upaya penyusunan laporan keuangan yang kredibel. Hal ini disebabkan oleh perannya yang cukup penting dalam rangka meminimalisasi terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan.

e. Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2008 mendefinisikan sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPI merupakan

kegiatan pengendalian terutama atas pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelegkapan informasi.¹⁵

7. Landasan Syar'i Laporan Keuangan

Dalam organisasi pemerintahan, akuntabilitas publik dapat dikatakan sebagai suatu bentuk pemberian informasi dan atas aktivitas dan kinerja financial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkaitan terhadap informasi tersebut. Mardiasmo menjelaskan bahwa akuntabilitas public sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah didalam surat Al-Anfal ayat 27 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya :

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui (Q.S Al-Anfal : 27).

Didukung oleh hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah r.a yang menjelaskan wajibnya menunaikan amanah kepada pemiliknya.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ انْتَمَتَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Terjemahannya :

“Rasulullah SAW bersabda, “tunaikanlah amanah kepada orang yang engkau dipercaya (untuk menunaikan amanah kepadanya), dan

¹⁵ Febrian Cahyo Pradono Basukianto, *Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor yang Mempengaruhi dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)*. h. 190-191

jangan khianati orang yang telah mengkhianatimu”. (HR. Abu Dawud : 3/290 No. 3535)

Kandungan ayat dan hadis tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada kaum mukmin, agar mereka senantiasa menjaga amanah yang telah diamanahkan kepada mereka sifat tawqaf. Firman Allah SWT dalam ayat dan hadis tersebut mencakup pengertian amanah dalam arti yang lebih luas yang pada dasarnya harus diterapkan disemua sektor kehidupan, seperti jual-beli (muamalah), kepemimpinan, transaksi keuangan, pengelolaan keuangan publik dan lain-lain. Dalam hal pengelolaan keuangan publik, implementasi ayat tersebut berupa sikap amanah/tanggung jawab (akuntabilitas) dan keterbukaan (transparansi) kepada public terhadap system pengelolaan keuangan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Dengan berdasar pada ayat tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk lebih akuntabel dan transparan kepada publik tentang bagaimana pengelolaan keuangan dipemerintah pusat maupun di daerah.

Pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat didalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam peraturan pemerintah no. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Hal ini juga dijelaskan dalam al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 70 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahan :

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar (Q.s Al-Ahzab :70)

Kandungan ayat tersebut menjelaskan perintah Allah SWT kepada kaum mukmin agar senantiasa bertakwa kepada Allah SWT dan berkata jujur (benar). Allah SWT memerintahkan kepada kaum mukmin untuk senantiasa berlaku dan

berkata jujur (benar). Arti jujur disini mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, misalnya dalam hal penyajian laporan keuangan, isi dari laporan keuangan haruslah menunjukkan sesuatu yang telah terjadi (apa adanya) yang didukung oleh bukti transaksi. Penyajiannya harus dapat menginterpretasikan keadaan yang sesungguhnya terjadi dilapangan. Segala informasi yang tersaji dalam laporan keuangan menjadi tanggung jawab entitas dalam pelaporannya. Hal ini sejalan dengan karakteristik kualitatif berdasarkan PP 71 yang didalamnya terdapat keandalan laporan keuangan yaitu laporan keuangan tersebut tersaji berdasarkan peristiwa yang dapat dipertanggung jawabkan.¹⁶

B. Standar Akuntansi Pemerintahan

1. Pengertian Akuntansi

Terdapat berbagai definisi akuntansi, diantaranya :

- b. Menurut *Accounting Principles Board* : “Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam mengambil keputusan ekonomi – membuat pilihan pilihan nalar diantara berbagai alternatif arah tindakan.”
- c. Menurut *American Accounting Association* : “Akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (Keuangan) dari suatu organisasi atau Entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak pihak yang memerlukan. Pengertian ini juga dapat melingkupi penganalisisan laporan yang dihasilkan oleh akuntansi tersebut.

Kedua definisi diatas menunjukkan bahwa pengertian akuntansi haruslah menghasilkan informasi yang berguna dalam mengambil keputusan ekonomi.

¹⁶ Rafid, “Pengaruh pemahaman SAP dan pemanfaatan SIA terhadap kualitas laporan keuangan dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi” h. 1-4

Keputusan ekonomi adalah keputusan yang menyangkut ilmu ekonomi, tidak terbatas pada keputusan yang berkaitan dengan dana yang dimiliki oleh pengambil keputusan.¹⁷

2. Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Sugijanto mengemukakan bahwa akuntansi terdiri atas tiga bidang utama, yaitu Akuntansi komersial/perusahaan (commercial accounting), akuntansi pemerintahan (governmental accounting), dan akuntansi sosial (social accounting). Dalam akuntansi komersial, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi keuangan kepada manajemen pemilik modal, penanam modal, kreditur, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Dalam akuntansi pemerintahan, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif dan masyarakat. Akuntansi sosial merupakan bidang akuntansi, seperti neraca pembayaran Negara, rekening arus dana, rekening pendapatan, dan produksi nasional, serta neraca nasional yang khusus diterapkan pada lembaga makro yang melayani perekonomian nasional.¹⁸

Akuntansi pemerintahan merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang pesat. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas public atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan. Sebagai salah satu bidang dalam akuntansi, definisi akuntansi pemerintahan tidak terlepas dari pemahaman tentang akuntansi itu sendiri, termasuk perkembangannya di Indonesia.¹⁹

¹⁷ Abdul halim, *Akuntansi keuangan daerah*, (Jakarta : Salemba Empat, 2007), h. 33

¹⁸ *Ibid*, h. 34

¹⁹ Novi Anggraini, “*Pengaruh Pemahaman SAP, Pemanfaatan SIKD, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU, 2017), h. 13

3. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar akuntansi adalah acuan dalam penyajian laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak pihak diluar organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi berterima umum. Standar akuntansi berguna bagi penyusunan laporan keuangandalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak pihak diluar organisasi.²⁰ Beberapa alasan yang menyebabkan penentuan standar memiliki peranan penting dalam penyajian laporan keuangan :

- a. Memberi informasi kepada pemakai tentang posisi keuangan, hasil usaha, dan hal hal yang berkaitan dengan perusahaan
- b. Memberi pedoman dan aturan bagi akuntan publik untuk melaksanakan kegiatan audit dan menguji validasi laporan keuangan
- c. Memberi data dasar bagi pemerintah tentang berbagai variable yang dipandang penting dalam mendukung pengenaan pajak, pembuatan regulasi, perencanaan ekonomi, dan peningkatan efisiensi dan tujuan sosial lainnya.
- d. Menghasilkan prinsip prinsip dan teori bagi mereka yang tertarik dengan disiplin akuntansi.²¹

4. Kerangka Konseptual SAP

Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan rujukan penting bagi KSAP, penyusunan laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan SAP.²²

²⁰ Wulandari dan Muhammad, *Teori, Konsep, dan Aplikasi Sektor Publik*, (Jakarta : Salemba Empat, 2014), h. 227

²¹ Uchiikhusy, *Standar Akuntansi*, <https://uciihksy.wordpress.com/2012/02/09/standar-akuntansi/>. Diunduh pada tanggal 22 November 2018

²² *PP No 24 Tahun 2005 Standar Akuntansi Pemerintahan*. cet. 1 (Jakarta: Pustaka Pergaulan, 2005). hal. 3-4.

Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah, dengan tujuan untuk menjadi acuan bagi:

- a. Penyusun Standar Akuntansi Pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Penyusun Laporan Keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar.
- c. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan SAP.
- d. Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP.

Kerangka konseptual SAP berfungsi sebagai pedoman jika terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam SAP. Namun jika terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar akuntansi, maka ketentuan standar akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual ini.

Kerangka konseptual SAP menekankan perlunya mempertimbangkan ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan. Ciri-ciri penting tersebut meliputi: Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan, dan sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah.²³

Kerangka konseptual merupakan konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan. Kerangka konseptual juga berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam standar akuntansi pemerintahan, akan tetapi bila terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dengan standar, maka ketentuan standar diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual.²⁴

²³Deddi Nordiawan et. al, *Akuntansi Pemerintahan*, (Jakarta: Salemba Empat, Ed. 2, 2007), h. 124.

²⁴ Hafiz, *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrua*, h. 8

5. Pemahaman Standar Akuntansi pemerintahan

Paham menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia mempunyai pengertian pandai dan mengerti mengerti benar, sedangkan pemahaman adalah prose, caraperbuatan memahami atau memahamkan. Ini berarti bahwa orang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti benar tentang akuntansi. Seseorang dikatakan paham apabila mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang diterapkan dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual terdiri dari kerangka konseptual dan 12 pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP), yaitu :

1. PSAP No. 01 (Penyajian Laporan Keuangan)

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual untuk pengakuan pendapatan, beban, pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas. Komponen pokok laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

2. PSAP No. 02 (Laporan Realisasi Anggaran)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

3. PSAP No. 03 (Laporan Arus Kas)

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

4. PSAP No. 04 (Catatan atas Laporan Keuangan)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih (SAL) Neraca, Laporan Operasional (LO),

Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

5. PSAP No. 05 (Akuntansi Persediaan)

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan juga pada saat diterima atau hak kepemilikannya atau penguasaannya berpindah.

6. PSAP No. 6 (Akuntansi Investasi)

Dengan menggunakan metode biaya investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Kemudian dengan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, digunakan, untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

7. PSAP No. 07 (Akuntansi Aset Tetap)

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

8. PSAP No. 08 (Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan)

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika: besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh, biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal, dan aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi (a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan (b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

9. PSAP No. 09 (Akuntansi Kewajiban)

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui

pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

10. PSAP No. 10 (Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak dilanjutkan)

Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas harus menerapkan pernyataan standar ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih (SAL) Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

11. PSAP No. 11 (Laporan Keuangan Konsolidasian)

Laporan keuangan untuk tujuan umum dari unit pemerintahan yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi menurut pernyataan standar ini agar mencerminkan satu kesatuan entitas.

12. PSAP No. 12 (Laporan Operasioanl)

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, Beban dan surplus/defisit operasional dari entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan priode sebelumnya.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintah merupakan sebuah proses untuk mengerti benar tentang standar akuntansi pemerintah yang berlaku umum dalam rangka penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD sehingga dapat memberikan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas.²⁵

²⁵ Anggraini, “Pengaruh Pemahaman SAP, Pemanfaatan SIKD, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”, h. 14

C. Sistem Informasi Keuangan Daerah

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah memanfaatkan teknologi informasi yang menghasilkan suatu sistem informasi yang menyediakan informasi mengenai keuangan daerah yang dapat diakses, dikelola dan didayagunakan oleh berbagai pihak dan masyarakat luas. Peraturan Pemerintah RI No. 65 tahun 2010, sistem informasi keuangan daerah selanjutnya disingkat SIKD adalah :

“Suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Informasi keuangan daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah”.²⁶

Tujuan penyelenggaraan SIKD adalah untuk :

- a. membantu Menteri Keuangan dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah;
- b. membantu menyediakan data dan informasi kepada Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (PKPD) pada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;
- c. membantu Menteri Keuangan dan instansi terkait lainnya dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah, penyusunan RAPBN, dan kebutuhan lain seperti statistik keuangan negara; dan
- d. membantu Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan keuangan dan menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), pemerintahan, dan pembangunan di Daerah.²⁷

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahan untuk menindak lanjuti

²⁶ *Ibid*, h.15-17

²⁷ *Sistem Informasi Keuangan Daerah*, <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=551>.
Diunduh pada 29 maret 2019

terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi yang berkembang begitu pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka pengelolaan dan akses terhadap keuangan daerah dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.

Selain itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan penyederhanaan akses antara unit kerja.

Seiring diberlakukannya penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, dapat dipastikan bahwa penerapannya memerlukan sarana pendukung berupa teknologi informasi yang berbasis sistem. Menurut Wilkinson et al. menyatakan bahwa teknologi informasi meliputi komputer (mainframe, mini, micro), perangkat lunak (software), database, jaringan (internet, intranet), electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. penggunaan teknologi informasi akan berdampak pada peningkatan dalam hal:

1. Tingkat Kecepatan

Informasi yang berkualitas adalah informasi yang tercipta tepat waktu sehingga dapat digunakan untuk membuat keputusan dengan cepat. Faktor kecepatan dalam mendapatkan informasi sering menyebabkan menjadi mahalnya informasi. Masalah kecepatan proses pengolahan data sampai menjadi informasi dalam sebuah sistem informasi ini akan terjawab jika sistem informasi didukung oleh teknologi informasi.

2. Tingkat Keamanan

Sebuah informasi disebut akurat jika informasi tersebut tidak bias atau menyesatkan dan jelas maksudnya. Akurasi informasi dapat dipelihara atau terganggu oleh beberapa hal, yaitu : Kelengkapan Informasi, Kebenaran informasi dan Keamanan informasi.

3. Tingkat Keefesienan Biaya

Didalam sistem informasi akuntansi yang sudah berbasis computer hanya dibutuhkan satu operator sistem saja yang bertugas sebagai entry data transaksi selebihnya proses pengolahan data dilakukan secara otomatis sehinga operator yang ada bisa dialokasikan untuk melaksanakan pekerjaan yang lain.

4. Tingkat Kualitas Hasil

Dalam sistem informasi Kualitas informasi (*quality of information*) juga digunakan untuk menyatakan informasi tersebut baik atau tidak. Kualitas informasi sering diukur berdasarkan : relevansi, ketepatan waktu dan keakurasian.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah suatu pemanfaatan sistem terpadu yang menggabungkan prosedur manual dengan proses komputerisasi dalam pengambilan data, pembukuan dan pelaporan semua transaksi keuangan oleh seluruh entitas pemerintah daerah.²⁸

D. Kompetensi Sumberdaya Manusia

Menurut Boyatzis, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari individu, yang kausal berkaitan dengan kinerja yang efektif atau superior dalam pekerjaan, seperti motif, sifat, keterampilan, aspek seseorang citra diri atau peran sosial, atau pengetahuan yang ia gunakan. Boutler dkk. menyatakan kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang untuk dapat menunjukkan kinerja yang baik di bidang pekerjaan, peran atau situasi. Menurut Cheng et al kompetensi adalah orang yang memiliki pengetahuan pendidikan, keterampilan dan pengalaman dan perilaku etis dalam pekerjaan. Susanto menyatakan bahwa kompetensi berarti karyawan memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan tugas mereka. Cohen mengatakan kompetensi adalah bidang

²⁸ Rianisanti, "Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan sistem pengendalian daerah dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderatin, h. 43

pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang meningkatkan efektifitas individu dalam menangani dunia .

Kompetensi adalah ciri seseorang yang dapat dilihat dari keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dimilikinya dalam hal menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya Sumber daya manusia adalah salah satu elemen yang penting dalam organisasi. Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi akan menentukan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuannya.

Pengertian sumber daya manusia menurut Werther dan Davis adalah orang-orang yang siap, mempunyai keinginan, dan mampu untuk berkontribusi dalam tujuan organisasi. Menurut Ndraha Sumber daya manusia berkualitas tinggi adalah sumber daya manusia yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif, tetapi juga nilai kompetitif generatifinovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti intelligence, creativity, dan imagination; tidak lagi semata-mata menggunakan energi kasar seperti bahan mentah, lahan, air, tenaga otot, dan sebagainya.

Kemampuan sumber daya manusia adalah kapasitas seseorang atau individu, suatu organisasi/kelembagaan, atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Oleh karena itu untuk meningkatkan kinerja dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah setiap sumber daya manusianya harus memiliki pemahaman yang baik tentang pekerjaannya seperti pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintahan yang menjadi prinsip dasar dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Desiana dkk, Kompetensi merupakan dasar seseorang untuk mencapai kinerja tinggi dalam menyelesaikan kinerjanya. Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif, dan ekonomis. Dalam hal ini pekerjaan yang dihasilkan tidak akan tepat waktu dan terdapat pemborosan waktu serta tenaga. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia maka waktu pembuatan laporan keuangan akan dapat dihemat. Hal ini karena sumber daya manusia tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan,

sehingga laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya. Semakin cepat laporan keuangan disajikan maka akan semakin baik dalam hal pengambilan keputusan.

Kompetensi Sumberdaya manusia adalah sebagai berikut:

- a) Pengetahuan (Knowledge) adalah pengetahuan yang dimiliki oleh seorang PPK-SKPD, PPTK, bendahara pengeluaran dan staf untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidangnya.
- b) Keterampilan (Skill) adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap PPK-SKPD, PPTK, bendahara pengeluaran dan staf untuk melaksanakan suatu tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah secara maksimal.
- c) Perilaku (Attitude) adalah pola tingkah laku PPK-SKPD, PPTK, bendahara pengeluaran dan staf dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.²⁹

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mendapat ide dan pengetahuan yang beragam dari penelitian sebelumnya. Review atas penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

| Nama Peneliti | Judul Penelitian | Variabel Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----------------------|--|---|--|
| Novi Anggraini (2017) | Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah Dan Sistem | Variabel independen : Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan | Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), dan Sistem Pengendalian |

²⁹ Puji Santoso, "Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal pemerintah, kompetensi sumberdaya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diprovinsi lampung", (Tesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, 2016), h. 29

| | | | |
|-----------------------|---|---|--|
| | Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi | Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal. Variable dependen : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Internal (SPI) berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. |
| Rashwan Zuhudy (2016) | Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi | Variabel independen : Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Variable dependen : Kualitas Laporan Keuangan dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai | <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan • Kompetensi SDM memoderasi hubungan antara pengaruh pemahaman SAP dan pemanfaatan SIA terhadap |

| | | variable moderasi | kualitas laporan keuangan |
|--------------------------------|---|---|---|
| Puji Santoso (2016) | Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Lampung | Variabel independen : Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi Variable dependen : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) • Kompetensi sumberdaya manusia (SDM) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) |
| Meta Dewi Rianisanti (2017) | Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kapasitas | Variabel independen : Pemanfaatan Sistem Informasi | <ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan Sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak |

| | | | |
|------------------------------------|---|--|--|
| | <p>Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada SKPD Kabupaten Klaten</p> | <p>Akuntansi Keuangan Daerah, dan Kapasitas Sumber daya manusia. Variable dependen : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan sistem pengendalian intern sebagai variable moderating.</p> | <p>berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah • Sistem pengendalian intern tidak dapat memoderasi pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. • Sistem pengendalian intern dapat memoderasi kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah |
| <p>Muhammad Hanif Purba (2017)</p> | <p>Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis</p> | <p>Variabel independen : Penerapan</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan standar akuntansi pemerintahan |

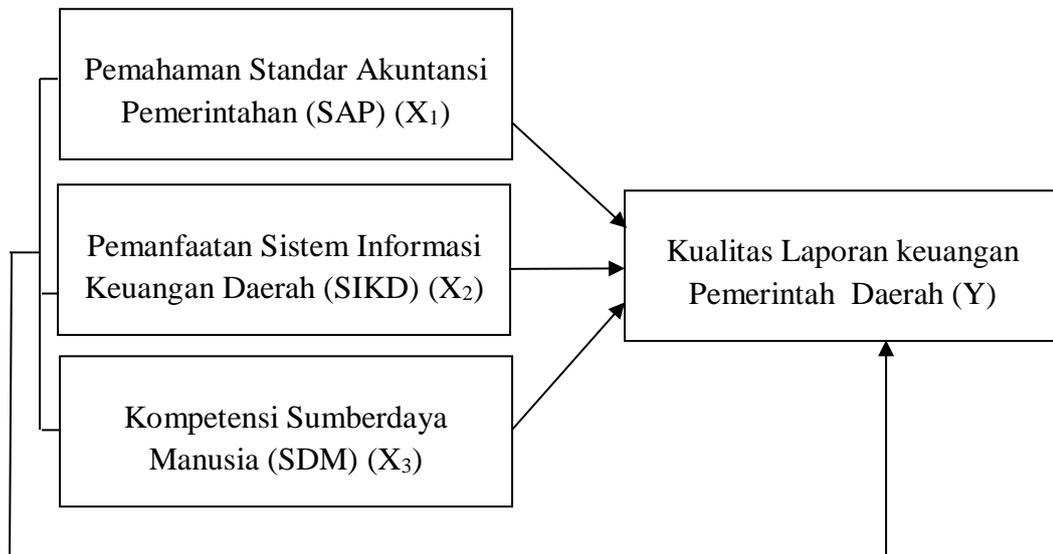
| | | | |
|--|---|---|--|
| | Akrual, Kebijakan Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang | Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, kebijakan akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia Variable dependen : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | berbasis akrual, kebijakan akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Deli serdang |
|--|---|---|--|

F. Kerangka Teoritis

Menurut Uma Sekaran yang dimaksud dengan kerangka teoritis adalah model konseptual yang menggambarkan hubungan di antara berbagai macam faktor yang telah diidentifikasi sebagai sesuatu hal yang penting bagi suatu masalah.³⁰ Peneliti menggunakan dua variabel independen dan satu variabel dependen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independennya adalah pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan system informasi keuangan daerah. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

³⁰ Nur Ahmadi Bi Rahmani. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Cet. 1 (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016). hal . 23

Berdasarkan uraian diatas maka model kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1

Kerangka Teoritis

Berdasarkan latar belakang dan kajian teori yang telah dikemukakan diatas dapat dijelaskan bahwa untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, diperlukan pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan system informasi keuangan daerah dan kompetensi sumberdaya manusia pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

Pemahaman Standar akuntansi pemerintah adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka kualitas orang orang yang melaksanakan tugas dalam menyusun laporan keuangan harus menjadi perhatian utama yaitu para pegawai yang terlibat dalam aktivitas tersebut harus memahami dan mengerti bagaimana proses dan pelaksanaan akuntansi dipemerintahan itu dijalankan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Rashwan Zuhudy (2016) yang mengemukakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah

(SAP) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

System informasi keuangan daerah dapat membantu dalam penyajian dan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. Jika kualitas system informasi berjalan dengan baik, maka semua proses akan berjalan dengan lancar, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan dengan kualitas yang baik. Dengan adanya fasilitas jaringan system informasi akuntansi yang dirancang khusus untuk proses penyusunan laporan keuangan akan mengurangi tingkat kesalahan dalam perhitungan dan menghemat waktu dalam proses penyusunannya. Sesuai dengan hasil penelitian Novi Anggraini (2017) mengemukakan bahwa pemanfaatan system informasi keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

SDM yang berkompetensi dan memiliki kecakupan serta pengetahuan dalam pengolahan informasi akan menghasilkan laporan keuangan yang bernilai tinggi dan berkualitas. Sebaliknya jika sumber daya manusia tidak memiliki keterampilan untuk mempertanggung jawabkan sistem dan kualitas laporan, maka laporan tidak dapat bernilai dalam fungsinya untuk pengambilan keputusan. Penelitian Choirunisah (2008) meneliti di KPPN Malang. Hasil penelitiannya menyatakan kemampuan sumberdaya manusia dan organisasi tim berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi keuangan satuan kerja.

G. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap tujuan penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran yang telah dibuat. Hipotesis merupakan pernyataan tentang hubungan antara beberapa variabel atau lebih.³¹ Penelitian ini ingin membuktikan pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan yang diduga berpengaruh secara simultan terhadap

³¹Wiratna Sujarweni. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi. Cet. 1* (Yogyakarta :Pustaka Baru Press, 2015). hal. 45

kualitas laporan keuangan pemerintah. Dan berdasarkan kerangka teoritis diatas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

- H₀₁ : Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) tidak berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
- H_{a1} : Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
- H₀₂ : Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) tidak berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
- H_{a2} : Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
- H₀₃ : Kompetensi Sumberdaya Manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
- H_{a3} : Kompetensi Sumberdaya Manusia berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
- H₀₄ : Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan Kompetensi Sumberdaya Manusia tidak berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
- H_{a4} : Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan Kompetensi Sumberdaya Manusia berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausal dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian kausal merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala. Sedangkan pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan yang menekankan pada pengujian teori-teori atau hipotesis-hipotesis melalui pengukuran variable-variabel penelitian dalam angka (*quantitative*) dan melakukan analisis data dengan prosedur statis dan pemodelan sistematis.³²

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang berada di Jl. Negara No 300 Sei Rampah di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan September 2018 sampai dengan September 2019 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

³² Sujoko Efferin. *Metode Penelitian Akuntansi*. ,(Yogyakarta:Graha Ilmu, 2008). hal. 47.

Tabel 3.1
Rincian Waktu Penelitian

| No | Kegiatan | September | | | | April | | | | Mei | | | | Juni | | | | Juli | | | | Agustus | | | | September | | | |
|----|--------------------|-----------|---|---|---|-------|---|---|---|-----|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|---------|---|---|---|-----------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pengajuan Judul | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Penulisan Proposal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Bimbingan Proposal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Diterima Proposal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Seminar Proposal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Riset | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian, atau benda, yang memiliki karakteristik tertentu dan dijadikan objek penelitian. Sugiyono menyatakan bahwa populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.³³ Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Serdang Bedagai yang berjumlah 45 OPD.

³³ Suryani dan Hendrayadi, *Metode riset kuantitatif*, (Jakarta : Mrenadamedia Grup, 2015) h.192

Tabel 3.2 Populasi
OPD Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai

| No | Badan/Dinas/Kantor |
|----|--|
| 1 | Sekretariat DPRD |
| 2 | Badan Pendapatan Daerah |
| 3 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 4 | Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset |
| 5 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 6 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 7 | Badan Kepegawaian Daerah |
| 8 | Dinas Sosial |
| 9 | Dinas Satpol PP |
| 10 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan |
| 11 | Dinas Pertanian |
| 12 | Dinas Pendidikan |
| 13 | Dinas Komunikasi dan Informasi |
| 14 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 15 | Dinas Ketahanan Pangan |
| 16 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| 17 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 18 | Dinas Kesehatan |
| 19 | Dinas Perhubungan |
| 20 | Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi |
| 21 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 22 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 23 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 24 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 25 | Dinas Perikanan dan Kelautan |
| 26 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 27 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu |

| | |
|----|---------------------------------------|
| 28 | Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai |
| 29 | Kecamatan Bandar Khalifah |
| 30 | Kecamatan Bintang Bayu |
| 31 | Kecamatan Dolok Masihul |
| 32 | Kecamatan Dolok Merawan |
| 33 | Kecamatan Kotarih |
| 34 | Kecamatan Pantai Cermin |
| 35 | Kecamatan Pegajahan |
| 36 | Kecamatan Perbaungan |
| 37 | Kecamatan Sei Bamban |
| 38 | Kecamatan Sei Rampah |
| 39 | Kecamatan Serba Jadi |
| 40 | Kecamatan Silinda |
| 41 | Kecamatan Sipispis |
| 42 | Kecamatan Tanjung Beringin |
| 43 | Kecamatan Tebing Syahbandar |
| 44 | Kecamatan Tebing Tinggi |
| 45 | Kecamatan Teluk Mengkudu |

Sumber : OPD-Kabupaten Serdang Bedagai

2. Sampel Penelitian

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diambil untuk diteliti dan hasil penelitiannya digunakan sebagai representasi dari populasi dari keseluruhan. Dengan demikian, sampel dapat dinyatakan sebagai bagian dari populasi yang diambil dengan teknik atau metode tertentu untuk diteliti dan digeneralisasikan terhadap populasi.³⁴ Teknik pengambilan yang digunakan adalah Purposive Sample. Purposive Sample merupakan teknik pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sample yang diperlukan.³⁵

³⁴ *Ibid*, h. 193

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung : Alfabeta, 1999) h. 156

Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah seluruh OPD yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengecuali seluruh kantor Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Serdang Bedagai. Sampel pada penelitian ini adalah Kassubag Perencanaan Keuangan dan Akuntabilitas dan Pegawai yang menjabat sebagai Bendahara di 28 OPD yang akan peneliti teliti. Dari sampel tersebut diambil 2 orang pegawai yang memenuhi kriteria untuk dijadikan responden. Sehingga jumlah sampel penelitian ini adalah $28 \times 2 \text{ orang} = 56 \text{ orang}$ responden.

D. Jenis Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data yang hasilnya dikumpulkan sendiri oleh peneliti dari tempat objek penelitian dan melengkapinya dengan data yang diperoleh dari pihak yang bersangkutan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh sipeneliti langsung dari objek yang diteliti.³⁶ Data diperoleh dari kantor OPD Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yaitu bagian keuangan/akuntansi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan tehnik kuesioner (angket). Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh data dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Kuesioner yang digunakan berasal dari kuesioner penelitian terdahulu yang telah dimodifikasi. Skala yang digunakan dalam kuesioner ini adalah skala likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan presepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Skala yang digunakan adalah Likert dengan kategori:

³⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian social dan ekonomi*, (Jakarta : Kencana, 2013), h. 128

Tabel 3.3**Tabel Skala Pengukuran Likert**

| Pertanyaan | Bobot |
|---------------------|-------|
| Sangat setuju | 5 |
| Setuju | 4 |
| Netral | 3 |
| Tidak setuju | 2 |
| Sangat tidak setuju | 1 |

F. Definisi Operasional

Konsep dan variabel seperti telah dijelaskan diatas masih bersifat abstrak sehingga masih sulit untuk dapat diadakan pengukuran. Agar konsep dan variabel dapat diukur, maka harus diubah menjadi konkrit dengan membuat definisi operasional. Tujuan dari definisi operasional adalah memberikan kejelasan akan variabel-variabel yang dipakai dalam penelitian sehingga variabel-variabel tersebut dapat diukur.³⁷

Tabel 3.4**Indikator Variabel**

| Variabel | Definisi | Indikator | Skala Ukur |
|--|--|---|--------------|
| Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (X ₁) | Proses untuk mengerti benar tentang standar akuntansi pemerintahan | a. Neraca b. Penyajian Laporan Realisasi Anggaran c. Penyajian Laporan Arus Kas d. Penyajian CALK e. Penilaian Persediaan | Skala Likert |

³⁷ Anggraini, "Pengaruh Pemahaman SAP, Pemanfaatan SIKD, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan", h. 30

| | | | |
|--|---|--|--------------|
| | | f. Pengakuan Aset tetap | |
| Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah (X ₂) | Pemanfaatan terhadap suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi. | <ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat Kecepatan b. Tingkat Keamanan c. Tingkat efesiensi biaya d. Tingkat Kualitas hasil | Skala Likert |
| Kompetensi Sumberdaya Manusia (X ₃) | Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga pegawai negeri sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien | <ul style="list-style-type: none"> a. Pengetahuan b. Keterampilan c. Sikap | Skala Likert |
| Kualitas Laporan Keuangan | Tingkat baik buruknya suatu laporan keuangan | <ul style="list-style-type: none"> a. Relevan b. Andal c. Dapat | Skala Likert |

| | | | |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|--|
| Pemerintah Daerah (Y) | pemerintah daerah | Dibandingkan d. Dapat dipahami | |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|--|

Sumber : Diolah dari berbagai referensi

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel dependen

1. Variabel Independen

Variabel independen yaitu variabel yang menjadi sebab terjadinya/terpengaruhnya variabel dependen.³⁸ Dalam penelitian ini variabel independen terdiri dari Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan disimbolkan dengan “X₁”, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah disimbolkan dengan “X₂” dan Kompetensi sumberdaya manusia disimbolkan dengan “X₃”.

1.1 Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan

Pemahaman standar akuntansi pemerintah merupakan sebuah proses untuk mengerti benar tentang standar akuntansi pemerintah yang berlaku umum dalam rangka penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD sehingga dapat memberikan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas.

Indikator variabel yang digunakan yaitu berasal dari PP 71 tahun 2010, yaitu Neraca, Penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Penyajian Laporan Arus Kas, Penyajian CALK, Penilaian Persediaan, Pengakuan Investasi, Pengakuan Aset Tetap, Perlakuan Akuntansi Konstruksi, Perlakuan Akuntansi Kewajiban, Perlakuan Akuntansi Koreksi Kesalahan. Nilai (*value*) diukur dengan instrument penelitian terdahulu yang telah dimodifikasi. Instrument ini menggunakan Skala Likert dengan skor 1 sampai 5. Skala 1 STS (Sangat Tidak Setuju), Artinya Standar Akuntansi Pemerintah sangat rendah pengaruhnya, skala 2 TS (Tidak Setuju), Artinya Standar Akuntansi Pemerintah rendah pengaruhnya, skala 3 N (Netral), Artinya Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh, Skala 4 S (Setuju), Artinya Standar Akuntansi Pemerintah tinggi pengaruhnya, Skala 5 SS (sangat

³⁸ Husein Umar, “*Metode Penelitian untuk Skripsi dan tesis bisnis*, Ed. 2, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), h. 48

Setuju), Artinya Standar Akuntansi Pemerintah sangat tinggi pengaruhnya dalam entitas pemerintah daerah.

1.2 Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah suatu pemanfaatan sistem terpadu yang menggabungkan prosedur manual dengan proses komputerisasi dalam pengambilan data, pembukuan dan pelaporan semua transaksi keuangan oleh seluruh entitas pemerintah daerah.

Indikator variabel yang digunakan ialah Tingkat Kecepatan, Tingkat Keamanan, Tingkat efisiensi biaya, dan Tingkat Kualitas hasil. Variabel pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah diukur dengan instrument penelitian terdahulu yang telah dimodifikasi. Instrument ini menggunakan Skala Likert dengan skor 1 sampai 5. Skala 1 STS (Sangat Tidak Setuju), Artinya Sistem Informasi Keuangan Daerah sangat rendah pengaruhnya, skala 2 TS (Tidak Setuju), Artinya Sistem Informasi Keuangan Daerah rendah pengaruhnya, skala 3 N (Netral), Artinya Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh, Skala 4 S (Setuju), Artinya Sistem Informasi Keuangan Daerah tinggi pengaruhnya, Skala 5 SS (sangat Setuju), Artinya Sistem Informasi Keuangan Daerah sangat tinggi pengaruhnya dalam entitas pemerintah daerah.

1.3 Kompetensi Sumberdaya manusia

Kompetensi Sumberdaya manusia ialah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga pegawai tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara professional, efektif, dan efisien.

Indikator kompetensi Sumberdaya Manusia adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Variabel Kompetensi Sumberdaya manusia diukur dengan instrument penelitian terdahulu yang telah dimodifikasi. Instrument ini menggunakan Skala Likert dengan skor 1 sampai 5. Skala 1 STS (Sangat Tidak Setuju), Artinya kompetensi sumberdaya manusia sangat rendah pengaruhnya, skala 2 TS (Tidak Setuju), Artinya kompetensi sumberdaya manusia rendah pengaruhnya, skala 3 N (Netral), Artinya kompetensi sumberdaya manusia berpengaruh, Skala 4 S (Setuju), Artinya kompetensi sumberdaya manusia tinggi

pengaruhnya, Skala 5 SS (sangat Setuju), Artinya kompetensi sumberdaya manusia sangat tinggi pengaruhnya dalam entitas pemerintah daerah

2. Variabel Dependen

Variabel dependen yaitu variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen.³⁹ Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disimbolkan dengan “Y”.

2.1 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Indikator yang digunakan ialah Peraturan yang menjelaskan terdapat 4 prasyarat normatif agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Variabel kualitas laporan keuangan pemerintah diukur dengan instrument penelitian terdahulu yang telah dimodifikasi. Instrument ini menggunakan Skala Likert dengan skor 1 sampai 5. Skala 1 STS (Sangat Tidak Setuju), Artinya Kualitas laporan keuangan pemerintah sangat rendah, skala 2 TS (Tidak Setuju), Artinya Kualitas laporan keuangan pemerintah rendah, skala 3 N (Netral), Artinya Kualitas laporan keuangan pemerintah cukup, Skala 4 S (Setuju), Artinya Kualitas laporan keuangan pemerintah tinggi, Skala 5 SS (sangat Setuju), Artinya Kualitas laporan keuangan pemerintah sangat tinggi.

G. Teknik Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data

³⁹ *Ibid*

melalui table, grafik, diagram lingkaran. Pictogram, perhitungan modus, median, mean, dan perhitungan desil.

Dalam statistic deskriptif juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata sampel atau populasi.⁴⁰

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk melihat kelayakan butir butir pernyataan dalam kuesioner tersebut dapat mendefinisikan suatu variabel. Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan pearson correlation yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan dengan tingkat kesalahan 5%, jika nilai pearson correlation $< 0,05$ disebut valid.

b. Uji Reliabilitas

Keandalan pengukuran dengan menggunakan *Alfa Cronbach* adalah koefisien keandalan yang menunjukkan seberapa baiknya item/butir dalam suatu kumpulan secara positif berkorelasi satu sama lain. Uji reliabilitas digunakan untuk menilai kestabilan ukuran dan konsistensi responden dalam menjawab kuesioner. Kuesioner tersebut mencerminkan konstruk sebagai dimensi suatu variabel yang disusun dalam bentuk pertanyaan. Uji reliabilitas dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh pertanyaan untuk lebih dari satu variabel. Kriteria Uji Reliabilitas, : Reabilitas suatu konstruk variable dikatakan baik jika memiliki nilai *Cronbach's Alfa* $> 0,60$.⁴¹

⁴⁰Sugiyono, *Metode Penelitian*, h. 142-143

⁴¹Juliansyah Noor, *Analisis data penelitian ekonomi dan manajemen*, (Jakarta : Grasindo, 2014), h. 19 - 25

3. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian regresi, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik yang berguna untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah memenuhi ketentuan dalam model regresi. Pengujian ini meliputi :

a. Uji Normalitas Data

Uji Normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Beberapa metode uji normalitas yaitu dengan melihat penyebaran data pada grafik normal *P-P Plot of Regresion Standardized residual* atau dengan uji *One Sample Kolmogrov Smirnov*. Distribusi data akan dikatakan normal apabila menghasilkan nilai residu lebih besardari 0,05.⁴²

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi ditemukan korelasi antar variabel independen yang kuat/tinggi. Untuk menguji adanya kolinearitas ganda digunakan uji varians inflation factors dan tolerance. Regresi bebas dari multikolinearitas jika nilai VIF < 2 .

c. Uji Heteroskedastisitas

Tujuan uji ini adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Model regresi dikatakan heteroskedastisitas jika tingkat signifikansi $< 0,05$ dan jika

⁴² Rochmat Adi Purnomo, *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Bersama SPSS*, (Ponorogo: CV Wade Group, 2017) hal 108

tingkat signifikansi $> 0,05$ maka model regresi homoskedastisitas.⁴³

4. Uji regresi linear berganda

Penelitian ini dianalisis dengan model regresi linear berganda (Multiple Regression Analysis) untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara variabel independen, yaitu pemahaman standar akuntansi pemerintahan (SAP), pemanfaatan system informasi keuangan daerah (SIKD) dan kompetensi sumberdaya manusia terhadap satu variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Persamaan regresi berganda dirumuskan :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

α : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi X_1, X_2, X_3

X_1 : Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan

X_2 : Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah

X_3 : Kompetensi Sumberdaya Manusia

E : Tingkat kesalahan (*error*)

5. Uji Hipotesis

a. Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinan mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinan (R^2) menjelaskan seberapa besar kemampuan model atau interaksi antara variabel independen (pemahaman standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan system informasi keuangan daerah dan

⁴³ Ibid, hal 63-65

kompetensi sumberdaya manusia) dalam menjelaskan variabel dependen (kualitas laporan keuangan pemerintah daerah).

b. Uji Regresi Parsial (t-test)

Uji Regresi Parsial bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi independen. Ada atau tidaknya pengaruh signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dapat diketahui dengan membandingkan nilai signifikannya dengan derajat kepercayaan. Apabila tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima. Demikian pula sebaliknya jika tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak.

c. Uji Regresi Silmultan (F-test)

Uji regresi simultan dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah semua variabel independen yang dimaksud dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen secara bebas.⁴⁴ Langkah langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji F adalah :

1. Jika $f_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai $sig F < \alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika $f_{hitung} < F_{tabel}$ dan nilai $sig F > \alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama sama variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

⁴⁴ Anggraini, "Pengaruh Pemahaman SAP, Pemanfaatan SIKD, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan", h. 30

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai

Nama Serdang Bedagai diambil dari dua kesultanan yang pernah memerintah di wilayah tersebut yakni Kesultanan Serdang dan Padang Bedagai. Kesultanan Serdang dimulai ketika terjadi perebutan tahta kesultanan Deli setelah Tuanku Panglima Paderap (pendiri kesultanan Deli) mangkat pada tahun 1723. Tuanku Gandar Wahid, anak kedua Tuanku Panglima Paderap mengambil alih tahta dengan tidak memperdulikan abangnya Tuanku Jalaludin dan adiknya Tuanku Umar. Tuanku Jalaludin tidak bisa berbuat banyak karena cacat fisik, sementara Tuanku Umar terpaksa mengungsi ke wilayah Serdang.

Keinginan untuk dimekarkannya Kabupaten Deli Serdang sebenarnya telah cukup lama muncul di kalangan masyarakat Kabupaten Deli Serdang dan Tahun 1992 hal tersebut telah menjadi kajian tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada masa itu. Dasar pertimbangan untuk dilakukannya pemekaran adalah luas wilayah dan jumlah penduduk yang begitu besar untuk suatu Kabupaten.

Kajian terhadap pemekaran wilayah pada masa itu telah sampai pada dikeluarkannya Keputusan DPRD Kabupaten Deli Serdang Nomor 02/DPRD/1992 tanggal 27 Februari 1992 tentang Persetujuan Pemekaran Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang yang menetapkan Kabupaten Deli Serdang dimekarkan menjadi 2 (dua) wilayah, yaitu Kabupaten Deli dan Kabupaten Serdang. Perencanaan pemekaran tersebut terhenti dan kembali bergulir pada saat reformasi terjadi tahun 1998. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan di Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor: 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, memberikan ruang yang semakin terbuka terhadap keinginan masyarakat untuk melakukan pemekaran.

Merencanakan Kabupaten Deli Serdang di bagi menjadi dua Kabupaten sesuai dengan konsep pemekaran Tahun 1992 dengan usulan ibukota Kabupaten

Pemekaran antara lain: Dolok Masihul, Sei Rampah dan Perbaungan. PPKD lebih menekankan pada pembentukan Kabupaten baru yakni Kabupaten Deli dengan ibukota Patumbak, sehingga tujuan dari diadakannya pemekaran tidak tampak, tetapi lebih pada keinginan untuk memisahkan diri dari Kabupaten Deli Serdang. P3KSB mengajukan konsep pemekaran Kabupaten Deli Serdang menjadi 2 (dua) yakni Kabupaten Deli Serdang sebagai Kabupaten Induk dan kabupaten Serdang Bedagai sebagai kabupaten pemekaran dengan ibukota kabupaten Sei Rampah.

Keinginan yang begitu besar dari masyarakat disikapi dengan arif dan bijaksana oleh Pemerintah kabupaten Deli Serdang dengan menyusun konsep dasar pemekaran Kabupaten dan melakukan kajian-kajian dalam rangka pemekaran tersebut. Berdasarkan penelitian dan masukan dari berbagai elemen masyarakat, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengusulkan Kabupaten Deli Serdang dimekarkan menjadi 3 (tiga) yaitu Kabupaten Deli Serdang sebagai kabupaten induk, Kabupaten Deli dan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai kabupaten pemekaran.

Perjalanan panjang proses pemekaran Kabupaten Deli Serdang secara hukum dimulai dari ditetapkannya Keputusan DPRD Kabupaten Deli Serdang Nomor: 13/KP/Tahun 2002 Tanggal 2 Agustus 2002 Tentang Persetujuan Pembentukan/Pemekaran Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya DPRD Propinsi Sumatera Utara melalui Keputusan Nomor: 18/K/2002 Tanggal 21 Agustus 2002 menetapkan Persetujuan Pemekaran Kabupaten Deli Serdang. DPRD Kabupaten Deli Serdang melalui Keputusan Nomor 26/K/DPRD/2003 Tanggal 9 Maret 2003 menetapkan Persetujuan Usul Rencana Pemekaran Kabupaten Deli Serdang menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Deli Serdang sebagai Kabupaten Induk dan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Kabupaten Pemekaran dengan ibukota Sei Rampah. Pertimbangan nama Kabupaten Serdang Bedagai didasarkan pada sejarah dimana wilayah ini dahulu berada dalam wilayah Kesultanan Serdang dan Kesultanan Bedagai.

Tanggal 6 Januari 2004 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Nomor 131.21-26 Tahun 2004 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Serdang

Bedagai Propinsi Sumatera Utara dan Mengangkat Bapak Drs. H. Chairullah S.IP, MAP sebagai Penjabat Bupati Serdang Bedagai. Atas nama Menteri Dalam Negeri Tanggal 15 Januari 2004 Gubernur Sumatera Utara Bapak T. Rizal Nurdin melantik Bapak Drs. H. Chairullah S.IP, MAP sebagai penjabat Bupati Serdang Bedagai. Setelah Masa Transisi 1 (satu) tahun diangkat kembali Penjabat Bupati Drs. H. Kasim Siyo, Msi pada tanggal 3 Maret 2005 yang ditugaskan untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) secara langsung maka terpilihlah Ir. H. T. Erry Nuradi, MBA menjadi Bupati dan Ir. Soekirman menjadi wakil Bupati Serdang Bedagai masa bakti 2005-2009.

Kabupaten Serdang Bedagai memiliki luas wilayah 1.900,22 km persegi, terbagi dalam 17 kecamatan dan 237 desa dan 6 kelurahan, didiami oleh penduduk dari beragam etnik/suku bangsa, agama dan budaya. Dimana suku tersebut antara lain Karo, Melayu, Tapanuli, Simalungun, Jawa dan lain-lain. Potensi sumber daya alam di Kabupaten Serdang Bedagai yang paling menonjol diantaranya: sektor pertanian, perkebunan dan perikanan serta sektor pariwisata. Sejak terbentuknya pemerintahan daerah yang baru, Sei Rampah merupakan Ibukota Kabupaten sebagai pusat pemerintahan, jaraknya dengan kota-kota kecamatan sangat bervariasi antara 7 Km s/d 51 Km. disamping Kec. Sei Rampah sebagai pusat kota, Kec. Perbaungan juga merupakan kota pusat perdagangan di kab. Serdang Bedagai yang diandalkan dimana kedua kecamatan ini menjadi indikator keberhasilan pertumbuhan pembangunan yang dilaksanakan. Kota-kota kecamatan yang letaknya relatif jauh (diatas 50 km) antara lain, kec. Dolok Merawan, kecamatan-kecamatan lain jaraknya berkisar 7 sampai dengan 32 km.

Kabupaten Serdang Bedagai terletak pada posisi 20 57" Lintang Utara, 30 16" Lintang Selatan, 980 33" Bujur Timur, 990 27" Bujur Barat dengan luas wilayah 1.900,22 km² dengan batas wilayah sebagai berikut sebelah utara dengan Selat Malaka, sebelah Selatan dengan Kabupaten Simalungun, sebelah timur dengan Kabupaten Asahan dan Kabupaten Simalungun, serta sebelah barat dengan kabupaten Deli Serdang. Dengan ketinggian wilayah 0-500 meter dari permukaan laut.

1. Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai

a. Visi

Mewujudkan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Kabupaten Terbaik. Dengan masyarakat yang Pancasila, Religius, Modern, Kompetitif dan Berwawasan Lingkungan.

b. Misi Untuk mencapai visi di susun misi kabupatenserdang bedagai sebagai berikut:

- 1). Mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan partisipasi berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan (Transparansi) dan akuntabilitas.
- 2). Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius, berdaya saing, inovatif dan profesional.
- 3). Mengembangkan perekonomian dan wilayah pembangunan berdasarkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang berwawasan lingkungan.
- 4). Meningkatkan pembangunan pedesaan dengan pola partisipatif melalui Gerakan Pembangunan Swadaya Rakyat (Gerbang Swara).
- 5). Mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban yang dinamis dengan menjunjung Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi⁴⁵

B. Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dan kompetensi sumberdaya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Responden dalam penelitian ini adalah Kassubag Perencanaan Keuangan dan akuntabilitas dan Pegawai yang menjabat sebagai bendahara yaitu berjumlah 56 orang.

⁴⁵ Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Serdang Bedagai

Untuk menjelaskan latar belakang responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Maka dibuat deskripsi profil responden dengan karakteristik data yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1

Data Responen Berdasarkan Jenis Kelamin

| Jenis Kelamin | Jumlah | Presentase |
|---------------|--------|------------|
| Perempuan | 22 | 39,29% |
| Laki- laki | 34 | 60,71% |
| Total | 56 | 100% |

Sumber : data primer diolah tahun 2019

Berdasarkan hasil tabel diatas, maka dapat diliat bahwa jumlah responden berjenis kelamin perempuan berjumlah 22 oarang dengan persentase 39,29%, sedangkan laki-laki berjumlah 34 orang dengan persentase 60,71%.

2. Berdasarkan Usia

Tabel 4.2

Data Responden Berdasarkan Usia

| Umur | Jumlah | Persentase |
|---------|--------|------------|
| 25 – 35 | 21 | 37,5% |
| 36 – 50 | 33 | 58,93% |
| >50 | 2 | 3,57% |
| Total | 56 | 100% |

Sumber : data primer diolah tahun 2019

Berdasarkan hasil tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa jumlah responden berdasarkan Usia 25 – 35 tahun berjumlah 21 orang dengan persentase 37,5%. Usia 36 – 50 tahun berjumlah 33 orang dengan persentase 58,93%. Dan usia >50 berjumlah 2 orang dengan persentase 3,57%.

3. Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 4.3**Data Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

| Pendidikan Terakhir | Jumlah | Persentase |
|---------------------|--------|------------|
| SMA | 1 | 1,79% |
| S1 | 44 | 78,57% |
| S2 | 11 | 19,64% |
| Total | 56 | 100% |

Sumber : data primer diolah tahun 2019

Berdasarkan hasil tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa jumlah responden berdasarkan pendidikan terakhir SMA berjumlah 1 orang dengan persentase 1,79%. Berpendidikan S1 berjumlah 44 orang dengan persentase 78,57%. Dan Berpendidikan S2 berjumlah 11 orang dengan persentase 19,64%.

4. Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Tabel 4.4**Data Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan**

| Latar Belakang Pendidikan | Jumlah | Persentase |
|---------------------------|--------|------------|
| Akuntansi | 12 | 21,43% |
| Manajemen | 14 | 25% |
| Ekonomi | 18 | 32,14% |
| Teknik | 7 | 12,5% |
| Kesehatan Masyarakat | 5 | 8,92% |
| Total | 56 | 100% |

Sumber : data primer diolah tahun 2019

Berdasarkan hasil tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa jumlah responden berdasarkan Latar belakang pendidikan Akuntansi berjumlah 12 orang dengan persentase 21,43%, latar belakang pendidikan Manajemen berjumlah 14 orang dengan persentase 25%, berlatar belakang pendidikan Ekonomi berjumlah 18 orang dengan persentase 32,14%, berlatar belakang pendidikan Teknik berjumlah

7 orang dengan persentase 12,5% dan berlatar belakang pendidikan Kesehatan Masyarakat berjumlah 5 orang dengan persentase 8,92%.

5. Berdasarkan Lama Bekerja

Tabel 4.5

Data Responden Berdasarkan Lama Bekerja

| Lama Bekerja | Jumlah | Persentase |
|---------------|--------|------------|
| 1 – 5 tahun | 15 | 26,79% |
| 6 – 10 tahun | 30 | 53,57% |
| 11 – 15 tahun | 8 | 14,28% |
| 16 – 20 tahun | 3 | 5,36% |
| Total | 56 | 100% |

Sumber : data primer diolah tahun 2019

Berdasarkan hasil tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa jumlah responden berdasarkan Lama Bekerja 1 – 5 tahun berjumlah 15 orang dengan persentase 26,79%, lama bekerja 6 – 10 tahun berjumlah 30 orang dengan persentase 53,57%, lama bekerja 11-15 tahun berjumlah 8 orang dengan persentase 14,28%, dan lama bekerja 16 – 20 tahun berjumlah 3 orang dengan persentase 5,36%.

C. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Deskriptif kategori variabel menggambarkan tanggapan responden mengenai pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi keuangan dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Analisis deskriptif ini terdiri dari nilai rata-rata (*mean*), standar devisi, nilai maksimum, nilai minimum. Berikut ini adalah hasil analisis statistik deskriptif dari data penelitian yang diolah :

Tabel 4.6
Statistik Deskriptif

| Descriptive Statistics | | | | | |
|-------------------------------|----|---------|---------|-------|----------------|
| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| X1 | 56 | 22 | 28 | 24,55 | 1,726 |
| X2 | 56 | 22 | 29 | 24,79 | 1,806 |
| X3 | 56 | 22 | 29 | 25,05 | 1,742 |
| Y | 56 | 22 | 29 | 25,27 | 1,646 |
| Valid N (listwise) | 56 | | | | |

Sumber : hasil olahan data pada SPSS 20

Berdasarkan tabel diatas terdapat 6 pertanyaan disetiap variabel dengan jumlah responden berjumlah 56 orang, X₁ responden memiliki nilai minimum 22 dan nilai maximum 28, Nilai rata-rata X₁ masing-masing responden sebesar 24,55 dengan persebaran atau penyimpangan rata-rata sebesar 1,726. X₂ responden memiliki nilai minimum 22 dan nilai maximum 29, Nilai rata-rata X₂ masing-masing responden sebesar 24,79 dengan persebaran atau penyimpangan rata-rata sebesar 1,806. X₃ responden memiliki nilai minimum 22 dan nilai maximum 29, Nilai rata-rata X₃ masing-masing responden sebesar 25,05 dengan persebaran atau penyimpangan rata-rata sebesar 1,742. Dan Y memiliki nilai minimum 22 dan nilai maximum 29, Nilai rata-rata Y masing-masing responden sebesar 25,27 dengan persebaran atau penyimpangan rata-rata sebesar 1,646.

D. Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan antara nilai r hitung atau nilai *Pearson Correlation* dengan membandingkan nilai r tabel. Apabila nilai r hitung > r tabel (dengan sig. 0,05) maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Jadi apabila nilai r hitung < r tabel (dengan sig. 0,05) maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid.

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas Variabel X₁

| No. Pertanyaan | <i>Corrected Item</i> | r tabel | Keterangan |
|----------------|-----------------------|---------|------------|
| 1 | 0,316 | 0,2632 | Valid |
| 2 | 0,384 | 0,2632 | Valid |
| 3 | 0,499 | 0,2632 | Valid |
| 4 | 0,422 | 0,2632 | Valid |
| 5 | 0,499 | 0,2632 | Valid |
| 6 | 0,633 | 0,2632 | Valid |

Sumber : hasil olahan data pada spss 20

Berdasarkan hasil validitas pada kuesioner bagi hasil, maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan item pertanyaan dapat dipertanyakan valid karena r hitung lebih besar dari r tabel yaitu 0.2632.

Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas Variabel X₂

| No. Pertanyaan | <i>Corrected Item</i> | r tabel | Keterangan |
|----------------|-----------------------|---------|------------|
| 1 | 0,526 | 0,2632 | Valid |
| 2 | 0,444 | 0,2632 | Valid |
| 3 | 0,596 | 0,2632 | Valid |
| 4 | 0,475 | 0,2632 | Valid |
| 5 | 0,613 | 0,2632 | Valid |
| 6 | 0,465 | 0,2632 | Valid |

Sumber : hasil olahan data pada spss 20

Berdasarkan hasil validitas pada kuesioner bagi hasil, maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan item pertanyaan dapat dipertanyakan valid karena r hitung lebih besar dari r tabel yaitu 0.2632.

Tabel 4.9
Hasil Uji Validitas Variabel X₃

| No. Pertanyaan | <i>Corrected Item</i> | r tabel | Keterangan |
|----------------|-----------------------|---------|------------|
| 1 | 0,471 | 0,2632 | Valid |
| 2 | 0,375 | 0,2632 | Valid |
| 3 | 0,697 | 0,2632 | Valid |

| | | | |
|---|-------|--------|-------|
| 4 | 0,466 | 0,2632 | Valid |
| 5 | 0,362 | 0,2632 | Valid |
| 6 | 0,489 | 0,2632 | Valid |

Sumber : hasil olahan data pada spss 20

Berdasarkan hasil validitas pada kuesioner bagi hasil, maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan item pertanyaan dapat dipertanyakan valid karena r hitung lebih besar dari r tabel yaitu 0.2632.

Tabel 4.10

Hasil Uji Validitas Variabel Y

| No. Pertanyaan | <i>Corrected Item</i> | r tabel | Keterangan |
|----------------|-----------------------|---------|------------|
| 1 | 0,275 | 0,2632 | Valid |
| 2 | 0,420 | 0,2632 | Valid |
| 3 | 0,651 | 0,2632 | Valid |
| 4 | 0,558 | 0,2632 | Valid |
| 5 | 0,329 | 0,2632 | Valid |
| 6 | 0,358 | 0,2632 | Valid |

Sumber : hasil olahan data pada spss 20

Berdasarkan hasil validitas pada kuesioner bagi hasil, maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan item pertanyaan dapat dipertanyakan valid karena r hitung lebih besar dari r tabel yaitu 0.2632.

2. Uji Reliabilitas

Selanjutnya terdapat uji reliabilitas. Suatu kuesioner dinyatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu. Pengujian reliabilitas kuantitatif variabel variabel dalam penelitian ini menggunakan *Cronbach Alpha*. Variabel variabel dalam penelitian ini dapat dikategorikan reliabel apabila nilai *Cronbach Alpha* lebih dari 0,60

Tabel 4.11
Hasil Uji Reliabilitas

| Variabel | <i>Cronbach Alpha</i> | N of Items |
|----------------|-----------------------|------------|
| X ₁ | 0,663 | 6 |
| X ₂ | 0,685 | 6 |
| X ₃ | 0,665 | 6 |
| Y | 0,626 | 6 |

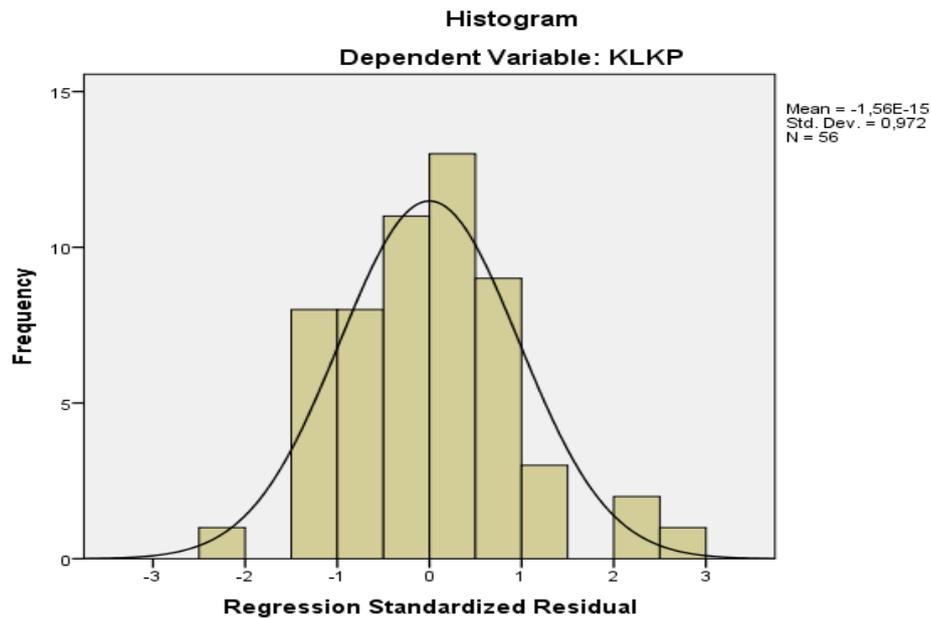
Sumber : Hasil olahan data pada spss 20

Berdasarkan tabel diatas, maka secara keseluruhan nilai *Cronbach Alpha* semua variabel adalah diatas 0,60. Dengan demikian indikator digunakan variabel Pemahaman standar akuntansi pemerintah (X₁), Pemanfaatan sistem informasi keuangan (X₂), Kompetensi sumber daya manusia (X₃), dan Kualitas laporan keuangan (Y) terbukti reliable atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

E. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Beberapa metode uji normalitas yaitu dengan melihat penyebaran data pada grafik normal P-P *Plot of Regression Standardized Residual* atau dengan uji *One Sample Kolmogrov Smirnov*. Distribusi data akan dikatakan normal apabila menghasilkan nilai residu lebih besar dari 0,05.



Gambar 4.1

Hasil Uji Normalitas dengan Histogram

Dependent Variabel : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Sumber : Hasil olahan data pada spss 20

Berdasarkan gambar 4.1 diatas uji normalitas dengan histogram dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel berdistribusi normal karena kurva histogram diatas berbentuk parabola dan bukan garis linier.

Selanjutnya adalah menggunakan perhitungan *Kolmogrov Smirnov*. Apabila nilai *asymptotic significant (2-tailed)* lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data variabel telah terdistribusi normal. Hasil uji normalitas seluruh variabel menggunakan perhitungan *Kolmogrov-Smirnov* menggunakan *software SPSS* dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 4.12
Hasil Uji Normalitas

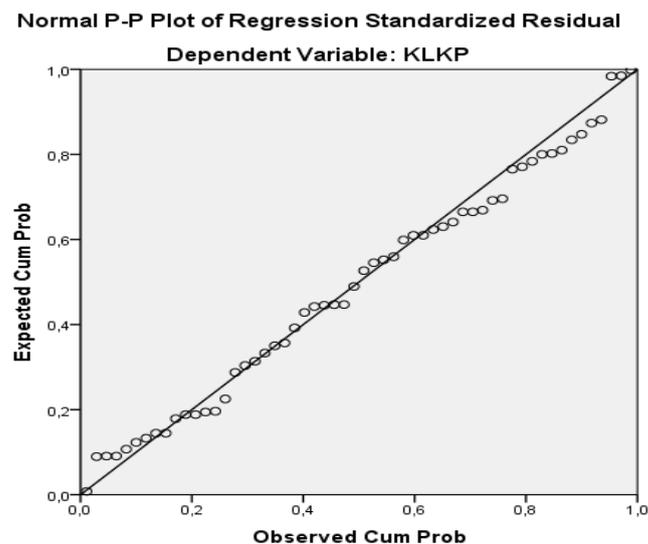
| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test | | Standardized Residual |
|------------------------------------|----------------|-----------------------|
| N | | 56 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | 0E-7 |
| | Std. Deviation | ,97234487 |
| | Absolute | ,067 |
| Most Extreme Differences | Positive | ,067 |
| | Negative | -,066 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | ,501 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,963 |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : hasil olahan data pada spss 20

Baik dilihat dari dari hasil uji normalitas seluruh variabel menggunakan perhitungan *Kolmogrov-Smirnov* nilai *asymptotic significant (2-tailed)* diatas lebih besar dari 0.05 yaitu 0,963 maka dapat disimpulkan bahwa data variabel telah berdistribusi normal.



Gambar 4.2

Hasil Uji Normalitas dengan Normal P-P Plot

Sumber : Hasil olahan data pada spss 20

Tampak pada gambar normal P-P *Plot* bahwa data menyebar sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis. Maka regresi memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinearitas

Hubungan linear antara variabel bebas disebut dengan Multikolinearitas. Dalam praktiknya, umumnya multikolinearitas tidak dapat dihindari. Dalam artian sulit menemukan dua variabel bebas yang secara matematis tidak berkorelasi (korelasi = 0) sekalipun secara substansi tidak berkorelasi. Secara umum, bila terjadi kolinearitas sempurna atau terjadi korelasi yang tinggi antar variabel bebas akan menyebabkan nilai determinan dari matriks $x'x$ akan mendekati 0 (akan sama dengan 0 jika korelasi sempurna), maka koefisien regresi tidak dapat diperoleh dikarenakan $(x'x)^{-1}$ tidak dapat dicari. Satu hal yang perlu ditekankan kembali disini bahwa multikolinearitas merupakan hubungan linear.

Tabel 4.13

Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
|-------|-----------------------------|------------|---------------------------|------|-------|-------------------------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | 2,159 | 2,456 | | ,879 | ,383 | |
| | SAP | ,476 | ,094 | ,500 | 5,074 | ,000 | ,711 |
| | SIKD | ,244 | ,087 | ,267 | 2,789 | ,007 | ,750 |
| | KSDM | ,214 | ,090 | ,227 | 2,379 | ,021 | ,758 |

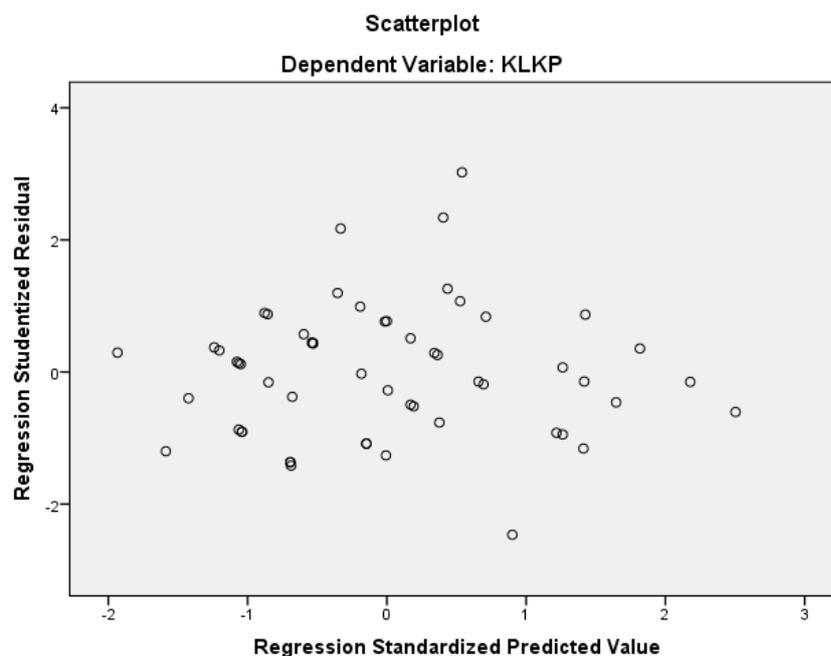
a. Dependent Variable: KLKP

Sumber : hasil olahan data SPSS 20

Berdasarkan Tabel 4.13, nilai VIF dari standar akuntansi pemerintahan adalah 1,406, nilai VIF dari Sistem informasi keuangan daerah adalah 1,333 dan nilai VIF dari kompetensi sumberdaya manusia adalah 1,320. Dikarenakan seluruh nilai VIF < 10, maka disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam variabel regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Jika titik-titik *scatter plot* membentuk pola tertentu, maka mengindikasikan adanya heteroskedastisitas. Namun jika titik-titik menyebar maka tidak terdapat heteroskedastisitas.



Gambar 4.3

Uji Heteroskedastisitas dengan *Scater Plot*

Sumber : Hasil olahan datan dengan SPSS 20

Data penelitian yang baik adalah yang tidak ada masalah heterosdastisitas. Salah satu cara dengan melihat *Scatter Plot*. Jika titik-titiknya menyebar di di daerah + dan – serta tidak membentuk pola maka dapat dikatakan data tersebut tidak ada masalah heterokedastisitas. Berdasarkan gambar diatas, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. hal ini disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

F. Uji Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS 20, maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.14
Hasil Regresi Berganda

| Coefficients ^a | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|------|-------|-------------------------|------|
| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. | Collinearity Statistics | |
| | B | Std. Error | Beta | | | Toleranc e | VIF |
| 1 | (Constant) | 2,159 | 2,456 | | ,879 | ,383 | |
| | SAP | ,476 | ,094 | ,500 | 5,074 | ,000 | ,711 |
| | SIKD | ,244 | ,087 | ,267 | 2,789 | ,007 | ,750 |
| | KSDM | ,214 | ,090 | ,227 | 2,379 | ,021 | ,758 |

a. Dependent Variable: KLKP

Sumber : Hasil olahan data pada SPSS 20

Dari nilai-nilai koefisien diatas, dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Maka :

$$Y = 2,159 + 0,476 X_1 + 0,244 X_2 + 0,214 X_3$$

Dimana :

- Ketika Pemahaman Standar Akuntansi pemerintah, Pemanfaatan sistem informasi keuangan dan kompetensi sumberdaya manusia sama dengan nol, maka besarnya variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah adalah sebesar 2,159. Dengan kata lain jika variabel bebas lainnya dengan nol berasrti besarnya variabel terikat yaitu Kualitas laporan keuangan pemerintah adalah 2,159
- Ketika variabel Pemahaman Standar akuntansi pemerintah ditingkatkan sebesar 1% maka kualitas laporan keuangan pemerintah akan meningkat sebesar 0,476 dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan (tetap) atau tidak mengalami perubahan

- c) Ketika variabel Pemanfaatan Sistem informasi keuangan daerah ditingkatkan sebesar 1% maka kualitas laporan keuangan pemerintah akan meningkat sebesar 0,244 dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan (tetap) atau tidak mengalami perubahan
- d) Ketika variabel Kompetensi sumberdaya manusia ditingkatkan sebesar 1% maka kualitas laporan keuangan pemerintah akan meningkat sebesar 0,214 dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan (tetap) atau tidak mengalami perubahan.

Berdasarkan hasil persamaan regresi tersebut, dapat diketahui bahwa hubungan yang terjadi antara Pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dan kompetensi sumberdaya manusia dengan kualitas laporan keuangan pemerintah adalah hubungan yang positif dimana ketika Standar Akuntansi Pemerintah sistem informasi keuangan daerah dan kompetensi sumberdaya manusia ditingkatkan maka akan berdampak pada kenaikan kualitas laporan keuangan.

G. Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinan (Adjusted R²)

Uji determinan dilakukan untuk menjelaskan ketepatan model atau mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. dalam penelitian ini uji determinan dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh pemahaman Standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dan kompetensi sumberdaya manusia dalam kualitas laporan keuangan pemerintah.

Tabel 4.15
Hasil Uji R²

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Change Statistics | | | | |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------|-----|-----|---------------|
| | | | | | R Square Change | F Change | df1 | df2 | Sig. F Change |
| 1 | ,801 _a | ,642 | ,621 | 1,01334 | ,642 | 31,029 | 3 | 52 | ,000 |

a. Predictors: (Constant), KSDM, SIKD, SAP

b. Dependent Variable: KLKP

Sumber : Hasil olahan data pada SPSS 20

Berdasarkan Tabel 4.15, diketahui nilai koefisien determinasi (*R-Square*) adalah 0,642. Nilai tersebut dapat diartikan variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan Sistem Informasi keuangan daerah dan kompetensi sumberdaya manusia mampu mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah sebesar 64,2%, sisanya sebesar 35,8% dijelaskan oleh variabel atau faktor lainnya.

2. Uji t (Uji Parsial)

Uji – t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Arah pengaruh variabel dilihat berdasarkan nilai koefisien regresinya. Jika nilai koefisien regresinya positif, berarti variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai koefisien regresinya negative, berarti variabel independen berpengaruh negative terhadap variabel dependen.

Tabel 4.17

Uji t

Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. | Collinearity Statistics | |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
| | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 (Constant) | 2,159 | 2,456 | | ,879 | ,383 | | |
| SAP | ,476 | ,094 | ,500 | 5,074 | ,000 | ,711 | 1,406 |
| SIKD | ,244 | ,087 | ,267 | 2,789 | ,007 | ,750 | 1,333 |
| KSDM | ,214 | ,090 | ,227 | 2,379 | ,021 | ,758 | 1,320 |

a. Dependent Variable: KLKP

Sumber : hasil olahan data dari SPSS 20

Dari tabel diatas dapat dilihat :

- a) Pengaruh variabel pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X_1) dalam kualitas laporan keuangan pemerintah

Dari tabel diatas menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 5,074 dengan signifikansi sebesar 5% nilai t_{tabel} untuk jumlah data sebesar 56 (n) dan variabel bebas (k) sebanyak 3 dengan taraf signifikan 5% maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,00665. Kemudian kita membandingkan jika $t_{hitung} >$ dari pada t_{tabel} maka variabel tersebut dinyatakan signifikan. Karena t_{hitung} untuk variabel X_1 (5,074) lebih besar dari t_{tabel} (2,00665) maka keputusannya H_a diterima, artinya bahwa variabel Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan dalam proses Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

- b) Pengaruh variabel Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah (X_2) dalam kualitas laporan keuangan pemerintah

Dari tabel diatas menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 2,789 dengan signifikansi sebesar 5% nilai t_{tabel} untuk jumlah data sebesar 56 (n) dan variabel bebas (k) sebanyak 3 dengan taraf signifikan 5% maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,00665. Kemudian kita membandingkan jika $t_{hitung} >$

dari pada t_{tabel} maka variabel tersebut dinyatakan signifikan. Karena t_{hitung} untuk variabel X_2 (2,789) lebih besar dari t_{tabel} (2,00665) maka keputusannya H_a diterima, artinya bahwa variabel Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan dalam proses Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

- c) Pengaruh variabel Kompetensi sumberdaya manusia (X_3) dalam kualitas laporan keuangan pemerintah

Dari tabel diatas menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 2,379 dengan signifikansi sebesar 5% nilai t_{tabel} untuk jumlah data sebesar 56 (n) dan variabel bebas (k) sebanyak 3 dengan taraf signifikan 5% maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,00665. Kemudian kita membandingkan jika $t_{hitung} >$ dari pada t_{tabel} maka variabel tersebut dinyatakan signifikan. Karena t_{hitung} untuk variabel X_3 (2,379) lebih besar dari t_{tabel} (2,00665) maka keputusannya H_a diterima, artinya bahwa variabel Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan dalam proses Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

3. Uji F (Uji Simultan)

Uji statistic F merupakan kelayakan model/alat uji statistic untuk menunjukkan apakah secara bersamasama atau keseluruhan dari koefisien regresi variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji statistic F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Dengan tingkat simultan signifikan sebesar 5% (0,05).

Tabel 4.16**Uji F****ANOVA^a**

| Model | | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 95,586 | 3 | 31,862 | 31,029 | ,000 ^b |
| | Residual | 53,396 | 52 | 1,027 | | |
| | Total | 148,982 | 55 | | | |

a. Dependent Variable: KLKP

b. Predictors: (Constant), KSDM, SIKD, SAP

Sumber : Hasil olahan data pada SPSS 20

Dari hasil perhitungan diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai F_{hitung} adalah sebesar 31,029. Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 ($sig < 0,05$) maka kesimpulannya adalah signifikan terlihat pada tabel diatas diperoleh nilai signifikansi (0,00) lebih kecil dari 0,05. Maka keputusannya adalah signifikan. Artinya H_a diterima yang menunjukkan secara bersama-sama (simultan) seluruh variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Untuk nilai F_{hitung} dalam persamaan ini sebesar 31,029 adapun untuk nilai F_{tabel} untuk jumlah data sebanyak 56, dengan jumlah variabel bebas sebanyak 3 dan variabel terikat sebanyak 1 dan taraf signifikansi 5% maka diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 2,78 maka F_{hitung} (31,029) lebih besar dari F_{tabel} (2,78) sehingga keputusan H_a diterima, yang artinya seluruh variabel bebas yang terdiri dari variabel Pemahaman Standar akuntansi Pemerintah, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dan kompetensi sumberdaya manusia secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, yaitu kualitas laporan keuangan.

H. Pembahasan

1. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X_1) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y)

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini ialah bahwasannya pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Artinya dengan pemahaman pegawai mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang memadai akan mampu meningkatkan Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Serdang Bedagai.

Dari tabel diatas menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar sebesar 5,074 dengan signifikansi sebesar 5% nilai t_{tabel} untuk jumlah data sebesar 56 (n) dan variabel bebas (k) sebanyak 3 dengan taraf signifikan 5% maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,00665. Kemudian kita membandingkan jika $t_{hitung} >$ dari pada t_{tabel} maka variabel tersebut dinyatakan signifikan. Karena t_{hitung} untuk variabel X_1 (5,074) lebih besar dari t_{tabel} (2,00665) maka keputusanya H_a diterima.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novi Anggraini (2017), yang mengemukakan bahwa berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan jika Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Tebing Tinggi. Jadi dapat dikatakan bahwa, jika pegawai pengelola keuangan semakin paham terhadap Standar Akuntansi Pemerintah maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga akan semakin meningkat. Hal yang sama juga dijelaskan dalam penelitian Rashwan Zuhudy (2016) yang menyatakan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Variabel pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif karena didukung dengan *agency theory* dimana untuk pemerintah daerah sebagai agen yang bertanggung jawab kepada principal dalam hal ini bentuk pertanggung jawaban yaitu dalam bentuk laporan keuangan daerah, untuk memenuhi kewajiban tersebut pemerintah daerah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang berkualitas, salah satu yang paling utama dalam pembuatan laporan tersebut ialah setiap pegawai harus memahami standar akuntansi pemerintah dengan baik sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan,

dapat dipahami dan dapat dipertanggung jawabkan serta bisa menjadi informasi yang berguna bagi para pengguna laporan keuangan tersebut. Karena hasil pengujian menunjukkan hasil yang positif dan signifikan jadi dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama (H_1) diterima.

2. Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah (X_2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y)

Hipotesis kedua yang diajukan yaitu pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Berdasarkan hasil analisis statistik menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 2,789 dengan signifikansi sebesar 5% nilai t_{tabel} untuk jumlah data sebesar 56 (n) dan variabel bebas (k) sebanyak 3 dengan taraf signifikan 5% maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,00665. Kemudian kita membandingkan jika $t_{hitung} >$ dari pada t_{tabel} maka variabel tersebut dinyatakan signifikan. Karena t_{hitung} untuk variabel X_2 (2,789) lebih besar dari t_{tabel} (2,00665) maka keputusannya H_a diterima, artinya bahwa variabel pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan dalam proses Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

Didukung dengan *agency theory* dimana peran pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggungjawab kepada *stakeholder* harus menyajikan sebuah informasi yang akurat dan tepat waktu. Salah satu upaya yang dilakukan pihak agen adalah dengan pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, dengan sistem informasi yang terkomputerisasi dengan baik dan terintegrasi dengan jaringan internet yang baik akan mampu menghasilkan informasi keuangan yang baik dan memenuhi karakteristik kualitatif sehingga informasi yang disajikan oleh pemerintah daerah dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak pengguna laporan keuangan. Hal ini juga dinyatakan oleh Ahmad (2008) bahwa untuk terselenggaranya proses penyampaian informasi yang cepat dan akurat sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik, pemerintah pusat dan daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan

memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Dalam kerangka ini, Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah mengamanatkan adanya dukungan sistem informasi keuangan daerah yang diselenggarakan secara nasional.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novi Anggraini (2017) yang menyatakan bahwa Pemanfaatan Sistem Informasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Tebing Tinggi. Akan tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Meta Dewi Rianisanti (2017) yang menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dikarenakan pada kabupaten Klaten belum optimal dalam memanfaatkan sistem informasi keuangan daerah yang diakibatkan masih terdapatnya gangguan jaringan internet dan jaringan komputer. Padahal Sistem informasi keuangan daerah adalah suatu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah dalam memberikan informasi keuangan sebagai bagian dari sistem informasi manajemen pemerintah daerah.

3. Pengaruh Kompetensi Sumberdaya Manusia (X_3) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y)

Hipotesis ketiga yang diajukan yaitu Kompetensi sumberdaya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Berdasarkan dari hasil analisis statistik menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 2,379 dengan signifikansi sebesar 5% nilai t_{tabel} untuk jumlah data sebesar 56 (n) dan variabel bebas (k) sebanyak 3 dengan taraf signifikansi 5% maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,00665. Kemudian kita membandingkan jika $t_{hitung} >$ dari pada t_{tabel} maka variabel tersebut dinyatakan signifikan. Karena t_{hitung} untuk variabel X_3 (2,379) lebih besar dari t_{tabel} (2,00665) maka keputusannya H_a diterima, artinya bahwa variabel kompetensi sumberdaya manusia

berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah.

Interpretasi dari temuan penelitian ini membuktikan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kompetensi sumberdaya manusia dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Serdang Bedagai. Hal ini menandakan bahwa kualitas laporan keuangan harus didukung pula oleh kompetensi sumberdaya manusia. Artinya semakin berkualitasnya seorang pegawai keuangan akan menunjang peningkatan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, sekalipun belum maksimal. Kompetensi sumberdaya manusia merupakan penggerak utama dalam suatu organisasi, dan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi organisasi. Setiap SKPD harus memiliki sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan karakteristik yang berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga para pegawai dapat melaksanakan tugasnya secara professional, efektif dan efisien.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Puji Santoso (2016) yang menyatakan bahwa kompetensi sumberdaya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Dan penelitian Muhammad Hanif Purba (2017) yang mengatakan bahwa kompetensi sumberdaya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Deli Serdang.

4. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X_1), Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah (X_2) dan Kompetensi Sumberdaya Manusia (X_3) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan dan kompetensi Sumberdaya Manusia terbukti berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai pemahaman Standar Akuntansi

Pemerintah, pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan dan kompetensi Sumberdaya Manusia maka semakin tinggi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah yang disajikan. Hasil pengujian deskriptif juga menunjukkan bahwa rata-rata responden untuk variabel pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan dan kompetensi Sumberdaya Manusia memperoleh nilai yang cukup tinggi.

Hasil uji F dari ke 3 variabel *independent* yaitu pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan dan Kompetensi Sumberdaya Manusia memiliki nilai yang signifikan dalam Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya ditemukan pada tabel diatas bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai F_{hitung} adalah sebesar 31,029. Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 ($sig < 0,05$) maka kesimpulannya adalah signifikan terlihat pada tabel diatas diperoleh nilai signifikansi (0,00) lebih kecil dari 0,05. Maka keputusannya adalah signifikan, selain itu kita bisa membandingkan antara nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan menentukan model. Jika F_{hitung} dalam persamaan ini sebesar 31,029 adapun nilai F_{tabel} dalam jumlah data sebanyak 56, dengan jumlah variabel bebas sebanyak 3 dan variabel terikat sebanyak 1 dan dengan tarif signifikansi 5% maka diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 2,78, maka F_{hitung} (31,029) lebih besar dari F_{tabel} (2,78) sehingga keputusan H_a diterima, yang artinya seluruh variabel bebas yang terdiri dari Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumberdaya Manusia secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumberdaya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah di Kabupaten Serdang Bedagai. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil pengujian hipotesis H_1 diterima, menunjukkan bahwa Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan ditunjukkan oleh nilai signifikan 5,074 yang artinya tingkat signifikansi di atas 0,05. Hal ini menyatakan bahwa variabel X_1 merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap Kualitas laporan keuangan Pemerintah.
2. Hasil Pengujian hipotesis H_2 diterima, menunjukkan bahwa Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan ditunjukkan oleh nilai signifikansi 2,789 yang artinya tingkat signifikansi di atas 0,05
3. Hasil Pengujian hipotesis H_3 diterima, menunjukkan Kompetensi Sumberdaya Manusia berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan ditunjukkan oleh nilai signifikansi 2,379 yang artinya tingkat signifikansi di atas 0,05
4. Hasil Pengujian hipotesis H_4 diterima, menunjukkan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan Kompetensi Sumberdaya Manusia berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan ditunjukkan oleh nilai signifikansi 31,029 yang artinya tingkat signifikansi di atas 0,05

5. Hasil uji koefisien determinan menunjukkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dan kompetensi sumberdaya manusia mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah sebesar 64,2%

B. Saran

1. Diharapkan bagi pemerintah daerah khususnya Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai agar dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan pegawai/staf bagian keuangan/akuntansi mengikuti berbagai pelatihan dan diklat mengenai Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Informasi Keuangan Daerah
2. Diharapkan juga kepada pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk memperhatikan koneksi jaringan internet dan pemeliharaan serta perbaikan komputer untuk mendukung proses akuntansi dan sistem pelaporan keuangan agar lebih mudah dan cepat serta menghasilkan laporan keuangan yang akurat.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel atau mengganti variabel lain yang lebih berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah dan disarankan sebaiknya tidak hanya menggunakan metode survey berupa penyebaran kuesioner, tetapi juga menggunakan metode wawancara untuk memperoleh hasil yang lebih baik, serta menambah jumlah sampel penelitian agar hasil penelitian lebih maksimal
4. Saran untuk perguruan tinggi lebih mengembangkan keilmuan pendalaman materi maupun skill atau bisa juga mengadakan seminar yang berhubungan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Novi. *Pengaruh Pemahaman SAP, Pemanfaatan SIKD, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU. 2017
- Basukianto, Febrian Cahyo Pradono. *Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor yang Mempengaruhi dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)*.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian social dan ekonomi*. Jakarta : Kencana. 2013
- Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Serdang Bedagai
- Efferin, Sujoko. *Metode Penelitian Akuntansi*. Yogyakarta : Graha Ilmu. 2008.
- Eriadi. *Analisis Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Sumatera Utara Dengan Efektivitas Reviu APIP Sebagai Pemoderasi*. Disertasi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 2018.
- Erlina et al. *Akuntansi keuangan daerah berbasis akrual*. Jakarta : Salemba Empat. cet. 2. 2015.
- Fatma, Dewi Aulia. *Analisis Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah(studi kasus pada SKPD kabupaten serdang bedagai*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU. 2017
- Hafiz, Abdul. *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual*. Bandung : Alfabeta. 2012.
- Halim, Abdul. *Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta : Salemba Empat. 2007.
- Hanif, Muhammad. *Pengaruh penerapan SAP berbasis akrual, kebijakan akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah kabupaten deli serdang*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU. 2017.
- Juniarty, Rixtrynita. *pengaruh kualitas sumberdaya manusia, implementasi sistem informasi manajemen daerah, kejelasan peran dan motivasi terhadap kinerja bendahara pengeluaran SKPD serdang bedagai*. Tesis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU. 2018

- Noor, Juliansyah. *Analisis data penelitian ekonomi dan manajemen*. Jakarta : Grasindo. 2014
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat, Ed. 2. 2010.
- Nordiawan, Deddi et. al, *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat. Ed. 2. 2007.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta : Salemba Empat. 2012.
- PP No 24 Tahun 2005 Standar Akuntansi Pemerintahan*. cet. 1. Jakarta: Pustaka Pergaulan, 2005
- Purnomo, Rochmat Adi. *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Bersama SPSS*. Ponorogo : CV Wade Group. 2017
- Rafid, Rashwan Zuhudy. *Pengaruh pemahaman SAP dan Pemanfaatan SIA terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. 2016.
- Rahmani, Nur Ahmadi Bi. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Cet. 1. Medan: FEBI UIN-SU Press. 2016.
- Rianisti, Meta Dewi. *Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderating*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, 2017
- Santoso, Puji. *Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal pemerintah, kompetensi sumberdaya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahdaerah diprovinsi lampung*. Tesis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. 2016.
- Sistem Informasi Keuangan Daerah*. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=551>.
Diunduh pada 29 maret 2019
- Sugiyono. *Metode Penelitian*. Bandung : Alfabeta 1999

- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi. Cet. 1* Yogyakarta : Pustaka Baru Press. 2015
- Suryani dan Hendrayadi. *Metode riset kuantitatif*. Jakarta : Mrenadamedia Grup. 2015
- Uchiikhusy, *Standar Akuntansi*,
<https://uciikhusy.wordpress.com/2012/02/09/standar-akuntansi/>. Diunduh pada tanggal 22 November 2018
- Umar, Husein “*Metode Penelitian untuk Skripsi dan tesis bisnis*. Ed. 2. Jakarta : Rajawali Pers. 2009.
- Wulandari dan Muhammad. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat. 2014

LAMPIRAN 1 : Data Kuesioner

Pengantar Kuesioner Penelitian

Kepada Yth :

Bapak/Ibu/Saudara/I Responden

di –

tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyusunan skripsi program studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, bersama ini peneliti bermaksud menyusun penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah Dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai”**. Oleh karena itu, peneliti membutuhkan data penelitian sesuai dengan judul tersebut. Adapun identitas dari peneliti adalah :

Nama : Rizky Aulina Nur

NIM : 52154097

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi Syariah

Peneliti menyadari sepenuhnya, adanya kuesioner ini mengganggu aktivitas Bapak/ibu yang padat. Namun dengan segala kerendahan diri, peneliti memohon kiranya Bapak/ibu berkenan meluangkan waktu untuk menjadi responden kuesioner ini. Partisipasi Bapak/ibu dalam memberikan jawaban pada setiap pertanyaan kuesione sebagaimana sesuai dengan kenyataan pada diri Bapak/ibu sangat kami hargai. Kuesioner ini hanya untuk keperluan skripsi, tidak untuk dipublikasikan secara luas, sehingga kerahasiaan data yang diisi dapat terjaga.

Demikian pengantar kuesioner penelitian ini, atas perhatian dan kerjasama Bapak/ibu, peneliti ucapkan terima kasih.

Medan, 10 September 2019

Hormat saya,

Peneliti

A. Identitas Responden

Untuk keperluan validitas jawaban kuesioner dan analisis data, kami memerlukan jawaban Bapak/Ibu/Saudara/i sebagai responden. Dimohon Bapak/Ibu/Saudara/i berkenan mengisi identitas berikut atau memberi tanda *checklist* (√) pada kotak yang tersedia.

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Laki Laki
 Perempuan
3. Usia : < 25 25 - 35
 36 - 50 > 50
4. Pendidikan Terakhir : SMP/SMA Diploma
 S1 S2 S3
5. Latar Belakang Pendidikan :

| | |
|------------------|--|
| a. Akuntansi | |
| b. Manajemen | |
| c. Ilmu Ekonomi | |
| d. Hukum | |
| e. Teknik | |
| f. Dan lain-lain | |
6. Jabatan :
7. Masa Kerja :

B. Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Cara pengisian Kuesioner
 - a. Semua pernyataan dijawab dengan cara memberikan tanda (√) pada salah satu jawaban yang tersedia dan paling tepat menurut persepsi Bapak/Ibu/Saudara/i

- b. Tidak ada benar atau salah dalam memberikan jawaban karena kami hanya memperhatikan pada satu angka atau jawaban yang menunjukkan persepsi terbaik dari Bapak/Ibu/Saudara/i
2. Terdapat beberapa pilihan pernyataan, yaitu :
- STS : Sangat Tidak Setuju
- TS : Tidak Setuju
- N : Netral
- S : Setuju
- SS : Sangat Setuju

1. Kuesioner Variabel Kualiatas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

| NO | PERNYATAAN | Alternatif Jawaban | | | | |
|----|--|--------------------|---|---|----|-----|
| | | SS | S | N | TS | STS |
| 1 | Laporan keuangan memiliki manfaat atau umpan balik atau memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan mengoreksi ekspektasinya dimasa lalu | | | | | |
| 2 | Laporan keuangan telah disusun atau disajikan tepat waktu dan telah mencakup seluruh informasi akuntansi sehingga dapat berguna untuk pembuatan keputusan pimpinan | | | | | |
| 3 | Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan memuat informasi yang dapat diuji/diverifikasi kebenarannya | | | | | |
| 4 | Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak berpihak kebutuhan tertentu | | | | | |
| 5 | Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya untuk kebijakan akuntansi yang sama | | | | | |
| 6 | Informasi keuangan yang disajikan oleh instansi/lembaga dapat dipahami oleh | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---------------------------|--|--|--|--|--|
| | pengguna laporan keuangan | | | | | |
|--|---------------------------|--|--|--|--|--|

2. Kuesioner variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X₁)

| NO | PERNYATAAN | Alternatif jawaban | | | | |
|----|---|--------------------|---|---|----|-----|
| | | SS | S | N | TS | STS |
| 1 | Pemahaman mengenai “Neraca” harus dimiliki oleh setiap staf keuangan untuk penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang relevan, andal, terpercaya dan dapat dibandingkan (PSAP 01) | | | | | |
| 2 | Pemahaman mengenai “Laporan Realisasi Anggaran” harus dimiliki oleh setiap staf keuangan untuk penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang relevan, andal, terpercaya dan dapat dibandingkan (PSAP 02) | | | | | |
| 3 | Pemahaman mengenai “Laporan Arus Kas” harus dimiliki oleh setiap staf keuangan untuk penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang relevan, andal, terpercaya dan dapat dibandingkan (PSAP 03) | | | | | |
| 4 | Pemahaman mengenai “Catatan atas Laporan Keuangan” harus dimiliki oleh setiap staf keuangan untuk penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang relevan, andal, terpercaya dan dapat dibandingkan (PSAP 04) | | | | | |
| 5 | Pemahaman mengenai “Persediaan” harus dimiliki oleh setiap staf keuangan untuk penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang relevan, andal, terpercaya dan dapat dibandingkan (PSAP 05) | | | | | |
| 6 | Pemahaman mengenai “Aset tetap” harus dimiliki oleh setiap staf keuangan untuk penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang relevan, andal, terpercaya dan dapat dibandingkan (PSAP 07) | | | | | |

3. Kuesioner Variabel Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah (X_2)

| NO | PERNYATAAN | Alternatif Jawaban | | | | |
|----|--|--------------------|---|---|----|-----|
| | | SS | S | N | TS | STS |
| 1 | Pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah membuka peluang untuk mengelola dan mengakses informasi keuangan secara cepat dan akurat | | | | | |
| 2 | Batasan akses penggunaan computer hanya pegawai/staf bagian sub bagian akuntansi dan keuangan guna menjaga kerahasiaan | | | | | |
| 3 | Dengan memanfaatkan sistem informasi keuangan daerah, keamanan dan kerahasiaan dapat terjaga | | | | | |
| 4 | Jaringan internet dan jaringan computer telah dimanfaatkan di unit kerja sebagai penghubung dalam pengiriman informasi telah terpasang di unit kerja | | | | | |
| 5 | Proses akuntansi dan pelaporan dilakukan secara komputerisasi sesuai dengan perundangan | | | | | |
| 6 | Teknologi informasi merupakan alat yang berfungsi untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan sistem pelaporan keuangan dengan mempermudah dan mempercepat serta menciptakan keakuratan hasil, berupa laporan keuangan. | | | | | |

4. Kuesioner Variabel Kompetensi Sumberdaya Manusia (X_3)

| NO | PERNYATAAN | Alternatif Jawaban | | | | |
|----|---|--------------------|---|---|----|-----|
| | | SS | S | N | TS | STS |
| 1 | Pemerintah Daerah telah menetapkan tugas pokok dan fungsi seluruh SDM yang melaksanakan penyusunan laporan keuangan | | | | | |
| 2 | Seluruh SDM yang ditugasi menyusun laporan keuangan telah menguasai tugasnya masing-masing | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 3 | Seluruh SDM penyusun laporan keuangan telah mengikuti pelatihan untuk dapat menunjang kelancaran penyusunan laporan keuangan | | | | | |
| 4 | Tenaga SDM penyusunan laporan keuangan seluruhnya mempunyai kemampuan untuk memahami aplikasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan | | | | | |
| 5 | Tenaga SDM bekerja dengan mengedepankan etika dan kode etik sebagai seorang akuntan | | | | | |
| 6 | Tenaga SDM selalu menolak setiap intervensi dari atasan yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap peraturan | | | | | |

LAMPIRAN 2 : Data Uji Instrumen

A. Data Uji Instrumen

1. Variabel Standar Akuntansi Pemerintah (X₁)

| No Responden | Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah | | | | | | TOTAL X ₁ |
|--------------|--|------|------|------|------|------|----------------------|
| | X1.1 | X1.2 | X1.3 | X1.4 | X1.5 | X1.6 | |
| 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 27 |
| 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 24 |
| 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 27 |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 28 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 26 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 23 |
| 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 24 |
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 25 |
| 10 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 27 |
| 11 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 12 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 27 |
| 13 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 25 |
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 15 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 25 |
| 16 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 24 |
| 17 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 23 |
| 18 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 24 |
| 19 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 25 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 21 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 25 |
| 22 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 23 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 22 |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 23 |
| 25 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 25 |
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 23 |
| 27 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 23 |
| 28 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 25 |
| 29 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 26 |
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 23 |
| 31 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 22 |
| 32 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 22 |
| 33 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 23 |
| 34 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 23 |
| 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 26 |

| | | | | | | | |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 25 |
| 37 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 23 |
| 38 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 23 |
| 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 26 |
| 40 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 27 |
| 41 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 22 |
| 42 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 27 |
| 43 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 |
| 44 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 24 |
| 45 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 23 |
| 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 47 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 23 |
| 48 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 28 |
| 49 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 22 |
| 50 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 23 |
| 51 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 25 |
| 52 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 26 |
| 53 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 54 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 28 |
| 55 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 24 |
| 56 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 28 |
| Total | 237 | 227 | 240 | 226 | 226 | 219 | 1375 |

2. Variabel Sistem Informasi Keuangan Daerah (X₂)

| No Responden | Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah | | | | | | TOTAL X ₂ |
|--------------|--|------|------|------|------|------|----------------------|
| | X2.1 | X2.2 | X2.3 | X2.4 | X2.5 | X2.6 | |
| 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29 |
| 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 27 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 24 |
| 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29 |
| 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 27 |
| 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 26 |
| 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 9 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 22 |
| 10 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 24 |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 12 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 26 |
| 13 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 23 |
| 14 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 |

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|----|
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 16 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 26 |
| 17 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 26 |
| 18 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 28 |
| 19 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 22 |
| 20 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 22 |
| 21 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 25 |
| 22 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 24 |
| 23 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 23 |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 25 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 26 |
| 26 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 |
| 27 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 |
| 28 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 24 |
| 29 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 22 |
| 30 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 23 |
| 31 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 23 |
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 33 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 |
| 34 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 25 |
| 35 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 26 |
| 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 26 |
| 37 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 22 |
| 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 39 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 24 |
| 40 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 26 |
| 41 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 22 |
| 42 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 26 |
| 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 44 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 26 |
| 45 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 23 |
| 46 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 25 |
| 47 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 |
| 48 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 27 |
| 49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 50 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 24 |
| 51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 52 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 27 |
| 53 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 27 |
| 54 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29 |
| 55 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 23 |

| | | | | | | | |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 56 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| Total | 240 | 226 | 219 | 239 | 233 | 231 | 1388 |

3. Variabel Kompetensi Sumberdaya Manusia (X_3)

| No Responden | Kompetensi Sumberdaya Manusia | | | | | | TOTAL X_3 |
|--------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|-------------|
| | X3.1 | X3.2 | X3.3 | X3.4 | X3.5 | X3.6 | |
| 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 26 |
| 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 27 |
| 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 28 |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 28 |
| 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 28 |
| 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 27 |
| 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 23 |
| 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 |
| 9 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 22 |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 23 |
| 11 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 26 |
| 12 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 26 |
| 13 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 26 |
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 15 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 25 |
| 16 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 24 |
| 17 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 26 |
| 18 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 27 |
| 19 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 23 |
| 20 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 23 |
| 21 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 25 |
| 22 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 23 |
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 23 |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 23 |
| 25 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 |
| 26 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 25 |
| 28 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29 |
| 29 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 25 |
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 31 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 24 |
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 25 |
| 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |

| | | | | | | | |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 35 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 26 |
| 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 |
| 37 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 28 |
| 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 39 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 27 |
| 40 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 26 |
| 41 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 22 |
| 42 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 27 |
| 43 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 26 |
| 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 45 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 46 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 26 |
| 47 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 23 |
| 48 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 |
| 49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 50 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 22 |
| 51 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 26 |
| 52 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 22 |
| 53 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 26 |
| 54 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 26 |
| 55 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 25 |
| 56 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 27 |
| Total | 241 | 231 | 229 | 238 | 236 | 228 | 1403 |

4. Variabel Kualitas Laporan keuangan pemerintah (Y)

| No Responden | Kualitas Laporan Keuangan | | | | | | TOTAL Y |
|--------------|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|
| | Y.1 | Y.2 | Y.3 | Y.4 | Y.5 | Y.6 | |
| 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 28 |
| 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 27 |
| 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 26 |
| 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 28 |
| 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 26 |
| 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 26 |
| 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 23 |
| 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 26 |
| 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 24 |
| 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 28 |
| 11 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 26 |
| 12 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 27 |
| 13 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 26 |

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|----|
| 14 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 27 |
| 15 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 |
| 16 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 17 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 25 |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 27 |
| 19 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 23 |
| 20 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 24 |
| 21 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 25 |
| 22 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 23 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 22 |
| 24 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 23 |
| 25 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 29 |
| 26 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 25 |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 25 |
| 28 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 26 |
| 29 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 26 |
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 31 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 23 |
| 32 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 24 |
| 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 23 |
| 34 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 23 |
| 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 24 |
| 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 25 |
| 37 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 25 |
| 38 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 |
| 39 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 40 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 26 |
| 41 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 23 |
| 42 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 28 |
| 43 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 26 |
| 44 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 45 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 23 |
| 46 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 24 |
| 47 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 |
| 48 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 27 |
| 49 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 24 |
| 50 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 24 |
| 51 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 |
| 52 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 27 |
| 53 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 26 |
| 54 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 28 |

| | | | | | | | |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 55 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 25 |
| 56 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 27 |
| Total | 235 | 236 | 244 | 219 | 240 | 241 | 1415 |

B. Statistic Descriptif

Descriptive Statistics

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|--------------------|----|---------|---------|-------|----------------|
| X1 | 56 | 22 | 28 | 24,55 | 1,726 |
| X2 | 56 | 22 | 29 | 24,79 | 1,806 |
| X3 | 56 | 22 | 29 | 25,05 | 1,742 |
| Y | 56 | 22 | 29 | 25,27 | 1,646 |
| Valid N (listwise) | 56 | | | | |

C. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

1. Uji Validitas

a. Validitas Standar Akuntansi Pemerintah

Correlations

| | | X1.1 | X1.2 | X1.3 | X1.4 | X1.5 | X1.6 | TOTAL |
|------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| X1.1 | Pearson Correlation | 1 | -,033 | ,152 | -,167 | -,107 | -,033 | ,316* |
| | Sig. (2-tailed) | | ,811 | ,263 | ,218 | ,431 | ,808 | ,018 |
| | N | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| X1.2 | Pearson Correlation | -,033 | 1 | -,097 | ,212 | ,044 | ,012 | ,384** |
| | Sig. (2-tailed) | ,811 | | ,477 | ,117 | ,748 | ,930 | ,003 |
| | N | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| X1.3 | Pearson Correlation | ,152 | -,097 | 1 | ,077 | ,069 | ,195 | ,499** |
| | Sig. (2-tailed) | ,263 | ,477 | | ,575 | ,612 | ,150 | ,000 |
| | N | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| X1.4 | Pearson Correlation | -,167 | ,212 | ,077 | 1 | -,004 | ,146 | ,422** |
| | Sig. (2-tailed) | ,218 | ,117 | ,575 | | ,979 | ,284 | ,001 |
| | N | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| X1.5 | Pearson Correlation | -,107 | ,044 | ,069 | -,004 | 1 | ,339* | ,499** |
| | Sig. (2-tailed) | ,431 | ,748 | ,612 | ,979 | | ,011 | ,000 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| X1.6 | N | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| | Pearson Correlation | -,033 | ,012 | ,195 | ,146 | ,339* | 1 | ,633** |
| | Sig. (2-tailed) | ,808 | ,930 | ,150 | ,284 | ,011 | | ,000 |
| TOTAL | N | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| | Pearson Correlation | ,316* | ,384** | ,499** | ,422** | ,499** | ,633** | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | ,018 | ,003 | ,000 | ,001 | ,000 | ,000 | |
| | N | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

b. Validitas Sistem Informasi Keuangan Daerah

Correlations

| | | X2.1 | X2.2 | X2.3 | X2.4 | X2.5 | X2.6 | TOTAL |
|------|---------------------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|
| X2.1 | Pearson Correlation | 1 | -,117 | ,173 | ,158 | ,312* | ,225 | ,526** |
| | Sig. (2-tailed) | | ,392 | ,202 | ,246 | ,019 | ,095 | ,000 |
| | N | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| X2.2 | Pearson Correlation | -,117 | 1 | ,087 | ,113 | ,260 | -,144 | ,444** |
| | Sig. (2-tailed) | ,392 | | ,525 | ,406 | ,053 | ,288 | ,001 |
| | N | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| X2.3 | Pearson Correlation | ,173 | ,087 | 1 | ,017 | ,112 | ,377** | ,596** |
| | Sig. (2-tailed) | ,202 | ,525 | | ,899 | ,412 | ,004 | ,000 |
| | N | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| X2.4 | Pearson Correlation | ,158 | ,113 | ,017 | 1 | ,328* | -,050 | ,475** |
| | Sig. (2-tailed) | ,246 | ,406 | ,899 | | ,014 | ,715 | ,000 |
| | N | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| X2.5 | Pearson Correlation | ,312* | ,260 | ,112 | ,328* | 1 | ,060 | ,613** |
| | Sig. (2-tailed) | ,019 | ,053 | ,412 | ,014 | | ,658 | ,000 |
| | N | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| X2.6 | Pearson Correlation | ,225 | -,144 | ,377** | -,050 | ,060 | 1 | ,465** |
| | Sig. (2-tailed) | ,095 | ,288 | ,004 | ,715 | ,658 | | ,000 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| | N | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| TOTAL | Pearson Correlation | ,526** | ,444** | ,596** | ,475** | ,613** | ,465** | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | ,000 | ,001 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | |
| | N | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

c. Validitas Kompetensi Sumberdaya Manusia

Correlations

| | | X3.1 | X3.2 | X3.3 | X3.4 | X3.5 | X3.6 | TOTAL |
|-------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| X3.1 | Pearson Correlation | 1 | -,059 | ,165 | ,136 | ,078 | ,036 | ,471** |
| | Sig. (2-tailed) | | ,664 | ,225 | ,316 | ,570 | ,791 | ,000 |
| | N | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| X3.2 | Pearson Correlation | -,059 | 1 | ,216 | -,143 | ,030 | ,072 | ,375** |
| | Sig. (2-tailed) | ,664 | | ,109 | ,294 | ,827 | ,596 | ,004 |
| | N | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| X3.3 | Pearson Correlation | ,165 | ,216 | 1 | ,128 | ,371** | ,114 | ,697** |
| | Sig. (2-tailed) | ,225 | ,109 | | ,348 | ,005 | ,402 | ,000 |
| | N | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| X3.4 | Pearson Correlation | ,136 | -,143 | ,128 | 1 | -,112 | ,272* | ,466** |
| | Sig. (2-tailed) | ,316 | ,294 | ,348 | | ,409 | ,042 | ,000 |
| | N | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| X3.5 | Pearson Correlation | ,078 | ,030 | ,371** | -,112 | 1 | -,202 | ,362** |
| | Sig. (2-tailed) | ,570 | ,827 | ,005 | ,409 | | ,136 | ,006 |
| | N | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| X3.6 | Pearson Correlation | ,036 | ,072 | ,114 | ,272* | -,202 | 1 | ,489** |
| | Sig. (2-tailed) | ,791 | ,596 | ,402 | ,042 | ,136 | | ,000 |
| | N | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| TOTAL | Pearson Correlation | ,471** | ,375** | ,697** | ,466** | ,362** | ,489** | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | ,000 | ,004 | ,000 | ,000 | ,006 | ,000 | |

| | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|----|----|
| N | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
|---|----|----|----|----|----|----|----|

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

d. Validitas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Correlations

| | | Y.1 | Y.2 | Y.3 | Y.4 | Y.5 | Y.6 | TOTAL |
|-------|---------------------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| Y.1 | Pearson Correlation | 1 | -,059 | -,081 | -,133 | -,149 | ,132 | ,275* |
| | Sig. (2-tailed) | | ,668 | ,553 | ,329 | ,272 | ,333 | ,040 |
| | N | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Y.2 | Pearson Correlation | -,059 | 1 | ,237 | ,090 | ,027 | -,276* | ,420** |
| | Sig. (2-tailed) | ,668 | | ,079 | ,509 | ,845 | ,039 | ,001 |
| | N | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Y.3 | Pearson Correlation | -,081 | ,237 | 1 | ,244 | ,150 | ,092 | ,651** |
| | Sig. (2-tailed) | ,553 | ,079 | | ,070 | ,271 | ,502 | ,000 |
| | N | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Y.4 | Pearson Correlation | -,133 | ,090 | ,244 | 1 | ,020 | ,225 | ,558** |
| | Sig. (2-tailed) | ,329 | ,509 | ,070 | | ,881 | ,095 | ,000 |
| | N | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Y.5 | Pearson Correlation | -,149 | ,027 | ,150 | ,020 | 1 | -,153 | ,329* |
| | Sig. (2-tailed) | ,272 | ,845 | ,271 | ,881 | | ,259 | ,013 |
| | N | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Y.6 | Pearson Correlation | ,132 | -,276* | ,092 | ,225 | -,153 | 1 | ,358** |
| | Sig. (2-tailed) | ,333 | ,039 | ,502 | ,095 | ,259 | | ,007 |
| | N | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| TOTAL | Pearson Correlation | ,275* | ,420** | ,651** | ,558** | ,329* | ,358** | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | ,040 | ,001 | ,000 | ,000 | ,013 | ,007 | |
| | N | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2. Uji Reliabilitas

a. Reliabilitas Standar Akuntansi Pemerintah

| Reliability Statistics | |
|------------------------|------------|
| Cronbach's Alpha | N of Items |
| ,663 | 6 |

b. Reliabilitas Sistem Informasi Keuangan Daerah

| Reliability Statistics | |
|------------------------|------------|
| Cronbach's Alpha | N of Items |
| ,685 | 6 |

c. Reliabilitas Kompetensi Sumberdaya Manusia

| Reliability Statistics | |
|------------------------|------------|
| Cronbach's Alpha | N of Items |
| ,665 | 6 |

d. Reliabilitas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

| Reliability Statistics | |
|------------------------|------------|
| Cronbach's Alpha | N of Items |
| ,626 | 6 |

D. Uji Asumsi Klasik

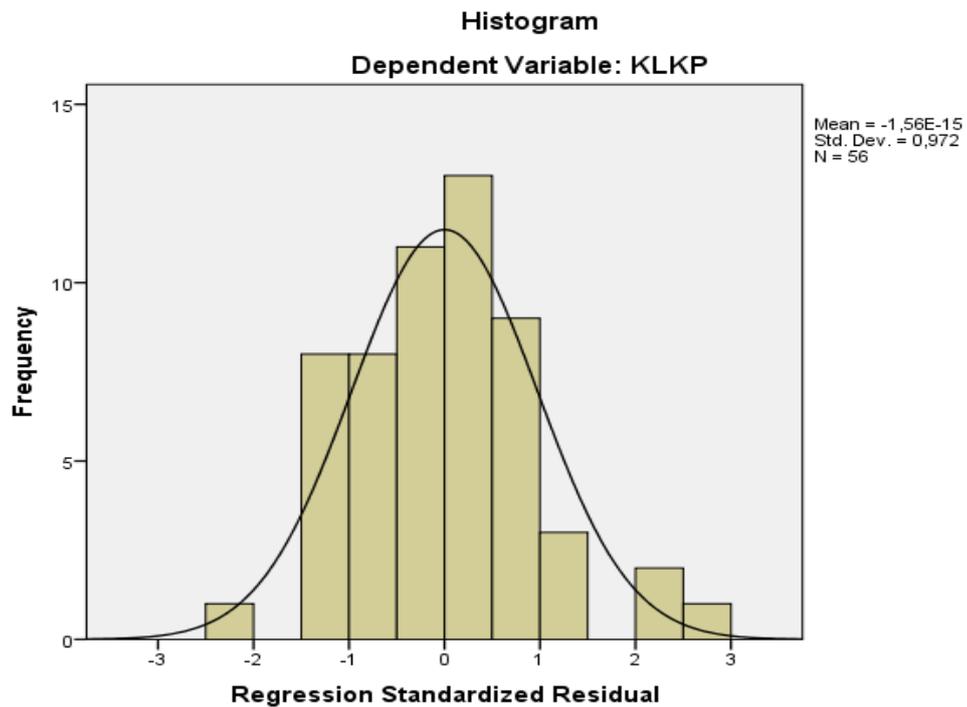
1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Standardized Residual |
|----------------------------------|----------------|--------------------------|
| N | | 56 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | 0E-7 |
| | Std. Deviation | ,97234487 |
| | Absolute | ,067 |
| Most Extreme Differences | Positive | ,067 |
| | Negative | -,066 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | ,501 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,963 |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.



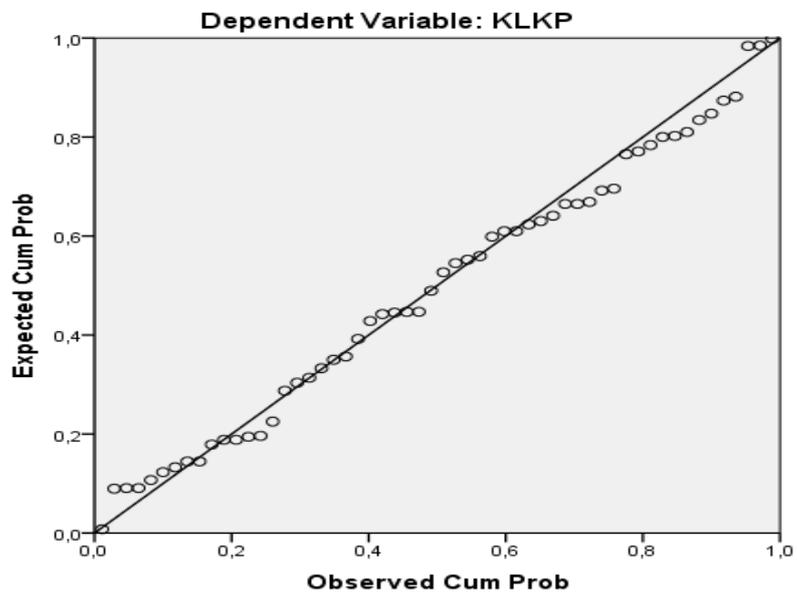
2. Uji Multikolinearitas

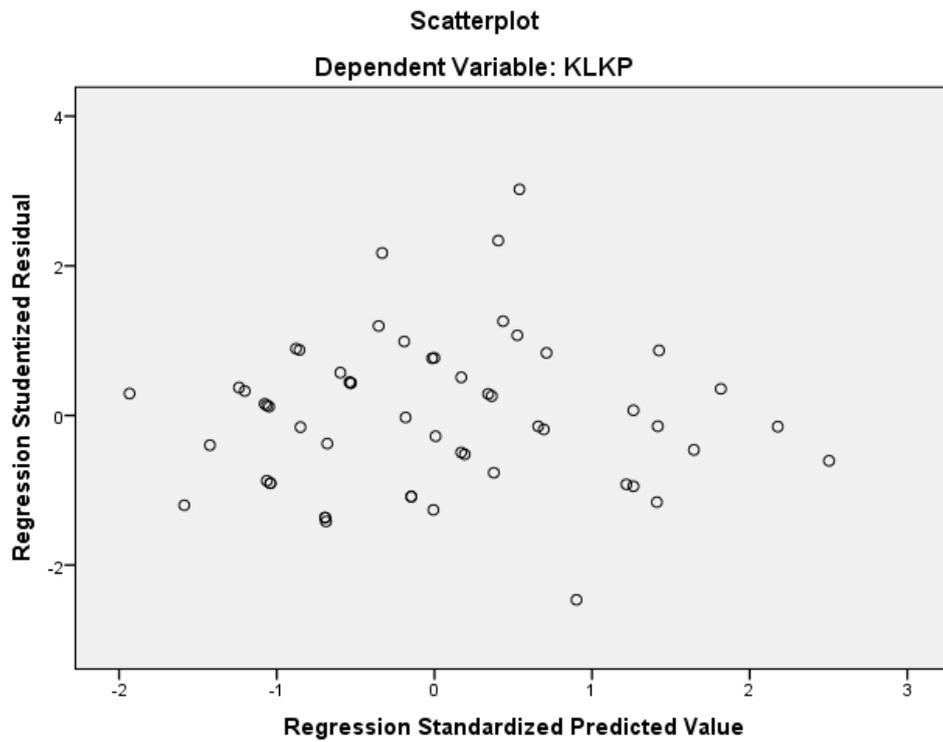
| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
|-------|-----------------------------|------------|---------------------------|------|-------|-------------------------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | 2,159 | 2,456 | | ,879 | ,383 | |
| | SAP | ,476 | ,094 | ,500 | 5,074 | ,000 | ,711 |
| | SIKD | ,244 | ,087 | ,267 | 2,789 | ,007 | ,750 |
| | KSDM | ,214 | ,090 | ,227 | 2,379 | ,021 | ,758 |

a. Dependent Variable: KLKP

3. Uji Heteroskedastisitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual





E. Uji Hipotesis

1. Uji Regresi Berganda

Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
|-------|-----------------------------|------------|---------------------------|------|-------|-------------------------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | 2,159 | 2,456 | | ,879 | ,383 | |
| | SAP | ,476 | ,094 | ,500 | 5,074 | ,000 | ,711 |
| | SIKD | ,244 | ,087 | ,267 | 2,789 | ,007 | ,750 |
| | KSDM | ,214 | ,090 | ,227 | 2,379 | ,021 | ,758 |

a. Dependent Variable: KLKP

2. Uji R²

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Change Statistics | | | | |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------|-----|-----|---------------|
| | | | | | R Square Change | F Change | df1 | df2 | Sig. F Change |
| 1 | ,801 ^a | ,642 | ,621 | 1,01334 | ,642 | 31,029 | 3 | 52 | ,000 |

a. Predictors: (Constant), KSDM, SIKD, SAP

b. Dependent Variable: KLKP

3. Uji t

Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
| | | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | 2,159 | 2,456 | | ,879 | ,383 | | |
| | SAP | ,476 | ,094 | ,500 | 5,074 | ,000 | ,711 | 1,406 |
| | SIKD | ,244 | ,087 | ,267 | 2,789 | ,007 | ,750 | 1,333 |
| | KSDM | ,214 | ,090 | ,227 | 2,379 | ,021 | ,758 | 1,320 |

a. Dependent Variable: KLKP

4. Uji F

ANOVA^a

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 95,586 | 3 | 31,862 | 31,029 | ,000 ^b |
| | Residual | 53,396 | 52 | 1,027 | | |
| | Total | 148,982 | 55 | | | |

a. Dependent Variable: KLKP

b. Predictors: (Constant), KSDM, SIKD, SAP

5. Tabel F

| Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05 | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| df untuk penyebut (N2) | df untuk pembilang (N1) | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 161 | 199 | 216 | 225 | 230 | 234 | 237 | 239 | 241 | 242 |
| 2 | 18.51 | 19.00 | 19.16 | 19.25 | 19.30 | 19.33 | 19.35 | 19.37 | 19.38 | 19.40 |
| 3 | 10.13 | 9.55 | 9.28 | 9.12 | 9.01 | 8.94 | 8.89 | 8.85 | 8.81 | 8.79 |
| 4 | 7.71 | 6.94 | 6.59 | 6.39 | 6.26 | 6.16 | 6.09 | 6.04 | 6.00 | 5.96 |
| 5 | 6.61 | 5.79 | 5.41 | 5.19 | 5.05 | 4.95 | 4.88 | 4.82 | 4.77 | 4.74 |
| 6 | 5.99 | 5.14 | 4.76 | 4.53 | 4.39 | 4.28 | 4.21 | 4.15 | 4.10 | 4.06 |
| 7 | 5.59 | 4.74 | 4.35 | 4.12 | 3.97 | 3.87 | 3.79 | 3.73 | 3.68 | 3.64 |
| 8 | 5.32 | 4.46 | 4.07 | 3.84 | 3.69 | 3.58 | 3.50 | 3.44 | 3.39 | 3.35 |
| 9 | 5.12 | 4.26 | 3.86 | 3.63 | 3.48 | 3.37 | 3.29 | 3.23 | 3.18 | 3.14 |
| 10 | 4.96 | 4.10 | 3.71 | 3.48 | 3.33 | 3.22 | 3.14 | 3.07 | 3.02 | 2.98 |
| 11 | 4.84 | 3.98 | 3.59 | 3.36 | 3.20 | 3.09 | 3.01 | 2.95 | 2.90 | 2.85 |
| 12 | 4.75 | 3.89 | 3.49 | 3.26 | 3.11 | 3.00 | 2.91 | 2.85 | 2.80 | 2.75 |
| 13 | 4.67 | 3.81 | 3.41 | 3.18 | 3.03 | 2.92 | 2.83 | 2.77 | 2.71 | 2.67 |
| 14 | 4.60 | 3.74 | 3.34 | 3.11 | 2.96 | 2.85 | 2.76 | 2.70 | 2.65 | 2.60 |
| 15 | 4.54 | 3.68 | 3.29 | 3.06 | 2.90 | 2.79 | 2.71 | 2.64 | 2.59 | 2.54 |
| 16 | 4.49 | 3.63 | 3.24 | 3.01 | 2.85 | 2.74 | 2.66 | 2.59 | 2.54 | 2.49 |
| 17 | 4.45 | 3.59 | 3.20 | 2.96 | 2.81 | 2.70 | 2.61 | 2.55 | 2.49 | 2.45 |
| 18 | 4.41 | 3.55 | 3.16 | 2.93 | 2.77 | 2.66 | 2.58 | 2.51 | 2.46 | 2.41 |
| 19 | 4.38 | 3.52 | 3.13 | 2.90 | 2.74 | 2.63 | 2.54 | 2.48 | 2.42 | 2.38 |
| 20 | 4.35 | 3.49 | 3.10 | 2.87 | 2.71 | 2.60 | 2.51 | 2.45 | 2.39 | 2.35 |
| 21 | 4.32 | 3.47 | 3.07 | 2.84 | 2.68 | 2.57 | 2.49 | 2.42 | 2.37 | 2.32 |
| 22 | 4.30 | 3.44 | 3.05 | 2.82 | 2.66 | 2.55 | 2.46 | 2.40 | 2.34 | 2.30 |
| 23 | 4.28 | 3.42 | 3.03 | 2.80 | 2.64 | 2.53 | 2.44 | 2.37 | 2.32 | 2.27 |
| 24 | 4.26 | 3.40 | 3.01 | 2.78 | 2.62 | 2.51 | 2.42 | 2.36 | 2.30 | 2.25 |
| 25 | 4.24 | 3.39 | 2.99 | 2.76 | 2.60 | 2.49 | 2.40 | 2.34 | 2.28 | 2.24 |
| 26 | 4.23 | 3.37 | 2.98 | 2.74 | 2.59 | 2.47 | 2.39 | 2.32 | 2.27 | 2.22 |
| 27 | 4.21 | 3.35 | 2.96 | 2.73 | 2.57 | 2.46 | 2.37 | 2.31 | 2.25 | 2.20 |
| 28 | 4.20 | 3.34 | 2.95 | 2.71 | 2.56 | 2.45 | 2.36 | 2.29 | 2.24 | 2.19 |
| 29 | 4.18 | 3.33 | 2.93 | 2.70 | 2.55 | 2.43 | 2.35 | 2.28 | 2.22 | 2.18 |
| 30 | 4.17 | 3.32 | 2.92 | 2.69 | 2.53 | 2.42 | 2.33 | 2.27 | 2.21 | 2.16 |
| 31 | 4.16 | 3.30 | 2.91 | 2.68 | 2.52 | 2.41 | 2.32 | 2.25 | 2.20 | 2.15 |
| 32 | 4.15 | 3.29 | 2.90 | 2.67 | 2.51 | 2.40 | 2.31 | 2.24 | 2.19 | 2.14 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 33 | 4.14 | 3.28 | 2.89 | 2.66 | 2.50 | 2.39 | 2.30 | 2.23 | 2.18 | 2.13 |
| 34 | 4.13 | 3.28 | 2.88 | 2.65 | 2.49 | 2.38 | 2.29 | 2.23 | 2.17 | 2.12 |
| 35 | 4.12 | 3.27 | 2.87 | 2.64 | 2.49 | 2.37 | 2.29 | 2.22 | 2.16 | 2.11 |
| 36 | 4.11 | 3.26 | 2.87 | 2.63 | 2.48 | 2.36 | 2.28 | 2.21 | 2.15 | 2.11 |
| 37 | 4.11 | 3.25 | 2.86 | 2.63 | 2.47 | 2.36 | 2.27 | 2.20 | 2.14 | 2.10 |
| 38 | 4.10 | 3.24 | 2.85 | 2.62 | 2.46 | 2.35 | 2.26 | 2.19 | 2.14 | 2.09 |
| 39 | 4.09 | 3.24 | 2.85 | 2.61 | 2.46 | 2.34 | 2.26 | 2.19 | 2.13 | 2.08 |
| 40 | 4.08 | 3.23 | 2.84 | 2.61 | 2.45 | 2.34 | 2.25 | 2.18 | 2.12 | 2.08 |
| 41 | 4.08 | 3.23 | 2.83 | 2.60 | 2.44 | 2.33 | 2.24 | 2.17 | 2.12 | 2.07 |
| 42 | 4.07 | 3.22 | 2.83 | 2.59 | 2.44 | 2.32 | 2.24 | 2.17 | 2.11 | 2.06 |
| 43 | 4.07 | 3.21 | 2.82 | 2.59 | 2.43 | 2.32 | 2.23 | 2.16 | 2.11 | 2.06 |
| 44 | 4.06 | 3.21 | 2.82 | 2.58 | 2.43 | 2.31 | 2.23 | 2.16 | 2.10 | 2.05 |
| 45 | 4.06 | 3.20 | 2.81 | 2.58 | 2.42 | 2.31 | 2.22 | 2.15 | 2.10 | 2.05 |
| 46 | 4.05 | 3.20 | 2.81 | 2.57 | 2.42 | 2.30 | 2.22 | 2.15 | 2.09 | 2.04 |
| 47 | 4.05 | 3.20 | 2.80 | 2.57 | 2.41 | 2.30 | 2.21 | 2.14 | 2.09 | 2.04 |
| 48 | 4.04 | 3.19 | 2.80 | 2.57 | 2.41 | 2.29 | 2.21 | 2.14 | 2.08 | 2.03 |
| 49 | 4.04 | 3.19 | 2.79 | 2.56 | 2.40 | 2.29 | 2.20 | 2.13 | 2.08 | 2.03 |
| 50 | 4.03 | 3.18 | 2.79 | 2.56 | 2.40 | 2.29 | 2.20 | 2.13 | 2.07 | 2.03 |
| 51 | 4.03 | 3.18 | 2.79 | 2.55 | 2.40 | 2.28 | 2.20 | 2.13 | 2.07 | 2.02 |
| 52 | 4.03 | 3.18 | 2.78 | 2.55 | 2.39 | 2.28 | 2.19 | 2.12 | 2.07 | 2.02 |
| 53 | 4.02 | 3.17 | 2.78 | 2.55 | 2.39 | 2.28 | 2.19 | 2.12 | 2.06 | 2.01 |
| 54 | 4.02 | 3.17 | 2.78 | 2.54 | 2.39 | 2.27 | 2.18 | 2.12 | 2.06 | 2.01 |
| 55 | 4.02 | 3.16 | 2.77 | 2.54 | 2.38 | 2.27 | 2.18 | 2.11 | 2.06 | 2.01 |
| 56 | 4.01 | 3.16 | 2.77 | 2.54 | 2.38 | 2.27 | 2.18 | 2.11 | 2.05 | 2.00 |
| 57 | 4.01 | 3.16 | 2.77 | 2.53 | 2.38 | 2.26 | 2.18 | 2.11 | 2.05 | 2.00 |
| 58 | 4.01 | 3.16 | 2.76 | 2.53 | 2.37 | 2.26 | 2.17 | 2.10 | 2.05 | 2.00 |
| 59 | 4.00 | 3.15 | 2.76 | 2.53 | 2.37 | 2.26 | 2.17 | 2.10 | 2.04 | 2.00 |
| 60 | 4.00 | 3.15 | 2.76 | 2.53 | 2.37 | 2.25 | 2.17 | 2.10 | 2.04 | 1.99 |

6. Tabel t

| Pr df | 0.25 0.50 | 0.10 0.20 | 0.05 0.10 | 0.025 0.050 | 0.01 0.02 | 0.005 0.010 | 0.001 0.002 |
|----------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1 | 1.00000 | 3.07768 | 6.31375 | 12.70620 | 31.82052 | 63.65674 | 318.3088 |
| 2 | 0.81650 | 1.88562 | 2.91999 | 4.30265 | 6.96456 | 9.92484 | 22.32712 |
| 3 | 0.76489 | 1.63774 | 2.35336 | 3.18245 | 4.54070 | 5.84091 | 10.21453 |
| 4 | 0.74070 | 1.53321 | 2.13185 | 2.77645 | 3.74695 | 4.60409 | 7.17318 |
| 5 | 0.72669 | 1.47588 | 2.01505 | 2.57058 | 3.36493 | 4.03214 | 5.89343 |
| 6 | 0.71756 | 1.43976 | 1.94318 | 2.44691 | 3.14267 | 3.70743 | 5.20763 |
| 7 | 0.71114 | 1.41492 | 1.89458 | 2.36462 | 2.99795 | 3.49948 | 4.78529 |
| 8 | 0.70639 | 1.39682 | 1.85955 | 2.30600 | 2.89646 | 3.35539 | 4.50079 |
| 9 | 0.70272 | 1.38303 | 1.83311 | 2.26216 | 2.82144 | 3.24984 | 4.29681 |
| 10 | 0.69981 | 1.37218 | 1.81246 | 2.22814 | 2.76377 | 3.16927 | 4.14370 |
| 11 | 0.69745 | 1.36343 | 1.79588 | 2.20099 | 2.71808 | 3.10581 | 4.02470 |
| 12 | 0.69548 | 1.35622 | 1.78229 | 2.17881 | 2.68100 | 3.05454 | 3.92963 |
| 13 | 0.69383 | 1.35017 | 1.77093 | 2.16037 | 2.65031 | 3.01228 | 3.85198 |
| 14 | 0.69242 | 1.34503 | 1.76131 | 2.14479 | 2.62449 | 2.97684 | 3.78739 |
| 15 | 0.69120 | 1.34061 | 1.75305 | 2.13145 | 2.60248 | 2.94671 | 3.73283 |
| 16 | 0.69013 | 1.33676 | 1.74588 | 2.11991 | 2.58349 | 2.92078 | 3.68615 |
| 17 | 0.68920 | 1.33338 | 1.73961 | 2.10982 | 2.56693 | 2.89823 | 3.64577 |
| 18 | 0.68836 | 1.33039 | 1.73406 | 2.10092 | 2.55238 | 2.87844 | 3.61048 |
| 19 | 0.68762 | 1.32773 | 1.72913 | 2.09302 | 2.53948 | 2.86093 | 3.57940 |
| 20 | 0.68695 | 1.32534 | 1.72472 | 2.08596 | 2.52798 | 2.84534 | 3.55181 |
| 21 | 0.68635 | 1.32319 | 1.72074 | 2.07961 | 2.51765 | 2.83136 | 3.52715 |
| 22 | 0.68581 | 1.32124 | 1.71714 | 2.07387 | 2.50832 | 2.81876 | 3.50499 |
| 23 | 0.68531 | 1.31946 | 1.71387 | 2.06866 | 2.49987 | 2.80734 | 3.48496 |
| 24 | 0.68485 | 1.31784 | 1.71088 | 2.06390 | 2.49216 | 2.79694 | 3.46678 |
| 25 | 0.68443 | 1.31635 | 1.70814 | 2.05954 | 2.48511 | 2.78744 | 3.45019 |
| 26 | 0.68404 | 1.31497 | 1.70562 | 2.05553 | 2.47863 | 2.77871 | 3.43500 |
| 27 | 0.68368 | 1.31370 | 1.70329 | 2.05183 | 2.47266 | 2.77068 | 3.42103 |
| 28 | 0.68335 | 1.31253 | 1.70113 | 2.04841 | 2.46714 | 2.76326 | 3.40816 |
| 29 | 0.68304 | 1.31143 | 1.69913 | 2.04523 | 2.46202 | 2.75639 | 3.39624 |
| 30 | 0.68276 | 1.31042 | 1.69726 | 2.04227 | 2.45726 | 2.75000 | 3.38518 |
| 31 | 0.68249 | 1.30946 | 1.69552 | 2.03951 | 2.45282 | 2.74404 | 3.37490 |
| 32 | 0.68223 | 1.30857 | 1.69389 | 2.03693 | 2.44868 | 2.73848 | 3.36531 |
| 33 | 0.68200 | 1.30774 | 1.69236 | 2.03452 | 2.44479 | 2.73328 | 3.35634 |
| 34 | 0.68177 | 1.30695 | 1.69092 | 2.03224 | 2.44115 | 2.72839 | 3.34793 |
| 35 | 0.68156 | 1.30621 | 1.68957 | 2.03011 | 2.43772 | 2.72381 | 3.34005 |
| 36 | 0.68137 | 1.30551 | 1.68830 | 2.02809 | 2.43449 | 2.71948 | 3.33262 |
| 37 | 0.68118 | 1.30485 | 1.68709 | 2.02619 | 2.43145 | 2.71541 | 3.32563 |
| 38 | 0.68100 | 1.30423 | 1.68595 | 2.02439 | 2.42857 | 2.71156 | 3.31903 |
| 39 | 0.68083 | 1.30364 | 1.68488 | 2.02269 | 2.42584 | 2.70791 | 3.31279 |
| 40 | 0.68067 | 1.30308 | 1.68385 | 2.02108 | 2.42326 | 2.70446 | 3.30688 |
| 41 | 0.68052 | 1.30254 | 1.68288 | 2.01954 | 2.42080 | 2.70118 | 3.30127 |
| 42 | 0.68038 | 1.30204 | 1.68195 | 2.01808 | 2.41847 | 2.69807 | 3.29595 |
| 43 | 0.68024 | 1.30155 | 1.68107 | 2.01669 | 2.41625 | 2.69510 | 3.29089 |
| 44 | 0.68011 | 1.30109 | 1.68023 | 2.01537 | 2.41413 | 2.69228 | 3.28607 |
| 45 | 0.67998 | 1.30065 | 1.67943 | 2.01410 | 2.41212 | 2.68959 | 3.28148 |
| 46 | 0.67986 | 1.30023 | 1.67866 | 2.01290 | 2.41019 | 2.68701 | 3.27710 |
| 47 | 0.67975 | 1.29982 | 1.67793 | 2.01174 | 2.40835 | 2.68456 | 3.27291 |
| 48 | 0.67964 | 1.29944 | 1.67722 | 2.01063 | 2.40658 | 2.68220 | 3.26891 |
| 49 | 0.67953 | 1.29907 | 1.67655 | 2.00958 | 2.40489 | 2.67995 | 3.26508 |
| 50 | 0.67943 | 1.29871 | 1.67591 | 2.00856 | 2.40327 | 2.67779 | 3.26141 |
| 51 | 0.67933 | 1.29837 | 1.67528 | 2.00758 | 2.40172 | 2.67572 | 3.25789 |
| 52 | 0.67924 | 1.29805 | 1.67469 | 2.00665 | 2.40022 | 2.67373 | 3.25451 |
| 53 | 0.67915 | 1.29773 | 1.67412 | 2.00575 | 2.39879 | 2.67182 | 3.25127 |
| 54 | 0.67906 | 1.29743 | 1.67356 | 2.00488 | 2.39741 | 2.66998 | 3.24815 |
| 55 | 0.67898 | 1.29713 | 1.67303 | 2.00404 | 2.39608 | 2.66822 | 3.24515 |
| 56 | 0.67890 | 1.29685 | 1.67252 | 2.00324 | 2.39480 | 2.66651 | 3.24226 |
| 57 | 0.67882 | 1.29658 | 1.67203 | 2.00247 | 2.39357 | 2.66487 | 3.23948 |
| 58 | 0.67874 | 1.29632 | 1.67155 | 2.00172 | 2.39238 | 2.66329 | 3.23680 |
| 59 | 0.67867 | 1.29607 | 1.67109 | 2.00100 | 2.39123 | 2.66176 | 3.23421 |
| 60 | 0.67860 | 1.29582 | 1.67065 | 2.00030 | 2.39012 | 2.66028 | 3.23171 |

7. Tabel R²

| df = (N-2) | Tingkat signifikansi untuk uji satu arah | | | | |
|------------|--|--------|--------|--------|--------|
| | 0.05 | 0.025 | 0.01 | 0.005 | 0.0005 |
| | Tingkat signifikansi untuk uji dua arah | | | | |
| | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.001 |
| 1 | 0.9877 | 0.9969 | 0.9995 | 0.9999 | 1.0000 |
| 2 | 0.9000 | 0.9500 | 0.9800 | 0.9900 | 0.9990 |
| 3 | 0.8054 | 0.8783 | 0.9343 | 0.9587 | 0.9911 |
| 4 | 0.7293 | 0.8114 | 0.8822 | 0.9172 | 0.9741 |
| 5 | 0.6694 | 0.7545 | 0.8329 | 0.8745 | 0.9509 |
| 6 | 0.6215 | 0.7067 | 0.7887 | 0.8343 | 0.9249 |
| 7 | 0.5822 | 0.6664 | 0.7498 | 0.7977 | 0.8983 |
| 8 | 0.5494 | 0.6319 | 0.7155 | 0.7646 | 0.8721 |
| 9 | 0.5214 | 0.6021 | 0.6851 | 0.7348 | 0.8470 |
| 10 | 0.4973 | 0.5760 | 0.6581 | 0.7079 | 0.8233 |
| 11 | 0.4762 | 0.5529 | 0.6339 | 0.6835 | 0.8010 |
| 12 | 0.4575 | 0.5324 | 0.6120 | 0.6614 | 0.7800 |
| 13 | 0.4409 | 0.5140 | 0.5923 | 0.6411 | 0.7604 |
| 14 | 0.4259 | 0.4973 | 0.5742 | 0.6226 | 0.7419 |
| 15 | 0.4124 | 0.4821 | 0.5577 | 0.6055 | 0.7247 |
| 16 | 0.4000 | 0.4683 | 0.5425 | 0.5897 | 0.7084 |
| 17 | 0.3887 | 0.4555 | 0.5285 | 0.5751 | 0.6932 |
| 18 | 0.3783 | 0.4438 | 0.5155 | 0.5614 | 0.6788 |
| 19 | 0.3687 | 0.4329 | 0.5034 | 0.5487 | 0.6652 |
| 20 | 0.3598 | 0.4227 | 0.4921 | 0.5368 | 0.6524 |
| 21 | 0.3515 | 0.4132 | 0.4815 | 0.5256 | 0.6402 |
| 22 | 0.3438 | 0.4044 | 0.4716 | 0.5151 | 0.6287 |
| 23 | 0.3365 | 0.3961 | 0.4622 | 0.5052 | 0.6178 |
| 24 | 0.3297 | 0.3882 | 0.4534 | 0.4958 | 0.6074 |
| 25 | 0.3233 | 0.3809 | 0.4451 | 0.4869 | 0.5974 |
| 26 | 0.3172 | 0.3739 | 0.4372 | 0.4785 | 0.5880 |
| 27 | 0.3115 | 0.3673 | 0.4297 | 0.4705 | 0.5790 |
| 28 | 0.3061 | 0.3610 | 0.4226 | 0.4629 | 0.5703 |
| 29 | 0.3009 | 0.3550 | 0.4158 | 0.4556 | 0.5620 |
| 30 | 0.2960 | 0.3494 | 0.4093 | 0.4487 | 0.5541 |
| 31 | 0.2913 | 0.3440 | 0.4032 | 0.4421 | 0.5465 |
| 32 | 0.2869 | 0.3388 | 0.3972 | 0.4357 | 0.5392 |
| 33 | 0.2826 | 0.3338 | 0.3916 | 0.4296 | 0.5322 |
| 34 | 0.2785 | 0.3291 | 0.3862 | 0.4238 | 0.5254 |
| 35 | 0.2746 | 0.3246 | 0.3810 | 0.4182 | 0.5189 |
| 36 | 0.2709 | 0.3202 | 0.3760 | 0.4128 | 0.5126 |
| 37 | 0.2673 | 0.3160 | 0.3712 | 0.4076 | 0.5066 |

| | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 38 | 0.2638 | 0.3120 | 0.3665 | 0.4026 | 0.5007 |
| 39 | 0.2605 | 0.3081 | 0.3621 | 0.3978 | 0.4950 |
| 40 | 0.2573 | 0.3044 | 0.3578 | 0.3932 | 0.4896 |
| 41 | 0.2542 | 0.3008 | 0.3536 | 0.3887 | 0.4843 |
| 42 | 0.2512 | 0.2973 | 0.3496 | 0.3843 | 0.4791 |
| 43 | 0.2483 | 0.2940 | 0.3457 | 0.3801 | 0.4742 |
| 44 | 0.2455 | 0.2907 | 0.3420 | 0.3761 | 0.4694 |
| 45 | 0.2429 | 0.2876 | 0.3384 | 0.3721 | 0.4647 |
| 46 | 0.2403 | 0.2845 | 0.3348 | 0.3683 | 0.4601 |
| 47 | 0.2377 | 0.2816 | 0.3314 | 0.3646 | 0.4557 |
| 48 | 0.2353 | 0.2787 | 0.3281 | 0.3610 | 0.4514 |
| 49 | 0.2329 | 0.2759 | 0.3249 | 0.3575 | 0.4473 |
| 50 | 0.2306 | 0.2732 | 0.3218 | 0.3542 | 0.4432 |
| 51 | 0.2284 | 0.2706 | 0.3188 | 0.3509 | 0.4393 |
| 52 | 0.2262 | 0.2681 | 0.3158 | 0.3477 | 0.4354 |
| 53 | 0.2241 | 0.2656 | 0.3129 | 0.3445 | 0.4317 |
| 54 | 0.2221 | 0.2632 | 0.3102 | 0.3415 | 0.4280 |
| 55 | 0.2201 | 0.2609 | 0.3074 | 0.3385 | 0.4244 |
| 56 | 0.2181 | 0.2586 | 0.3048 | 0.3357 | 0.4210 |
| 57 | 0.2162 | 0.2564 | 0.3022 | 0.3328 | 0.4176 |
| 58 | 0.2144 | 0.2542 | 0.2997 | 0.3301 | 0.4143 |
| 59 | 0.2126 | 0.2521 | 0.2972 | 0.3274 | 0.4110 |
| 60 | 0.2108 | 0.2500 | 0.2948 | 0.3248 | 0.4079 |

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Rizky Aulina Nur
NIM : 52.15.409.7
Tempat/Tgl.Lahir : Pergajahan Kahan, 23 Desember 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jalan Selamat Ujung, Gang Rahma No 175B¹ Sitirejo III
Medan Amplas
No. Telp : 0821-6511-3006
Email : rizkyaulina_nur@yahoo.com

Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2003 – 2009 : MIN Bintang Bayu
2. Tahun 2009 – 2012 : MTs. GUPPI Bintang Bayu
3. Tahun 2012 – 2015 : SMA Swasta Eria Medan
4. Tahun 2015 – 2019 : S1 Akuntansi Syariah UINSU Medan

Riwayat Organisasi

1. Anggota Organisasi IMKB Kecamatan Bintang Bayu
2. Anggota Organisasi LKSM Uinsu Angkatan 13